

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Pelaporan dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan /pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

2. Kedudukan

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Kpts/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Biro Kerja Sama Luar Negeri merupakan salah satu unsur pelaksana di Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal melaksanakan fungsi manajemen pendukung pembangunan pertanian dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, sedangkan Biro Kerja Sama Luar Negeri melaksanakan fungsi manajemen mendukung pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian khususnya pada aspek manajemen kerja sama luar negeri di bidang Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian.
2. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian.
3. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian.
4. Penyiapan kerja sama, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri
5. Pelaksanaan administrasi Atase Pertanian; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja sama Luar Negeri.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Susunan organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri dari :

- (1) Bagian Bilateral
- (2) Bagian Regional
- (3) Bagian Multilateral
- (4) Bagian Pengelolaan dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian;

Bagian Bilateral memiliki 3 Sub Bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik;
2. Sub Bidang Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan Negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa;
3. Sub Bidang Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan Negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

Bagian Regional memiliki 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan negara-negara di kawasan ASEAN;
2. Sub Bagian Non-ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan negara-negara di kawasan Non-ASEAN;
3. Sub Bagian Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan negara-negara di kawasan Intra Kawasan.

Bagian Multilateral memiliki 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang pangan, pertanian dan lingkungan;
2. Sub Bagian Organisasi Internasional Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional non-pemerintah;
3. Sub Bagian Organisasi Internasional Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional non-pemerintah;

Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri memiliki 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kerja sama dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri dibidang pertanian;
2. Sub Bagian Administrasi Atase Pertanian mempunyai tugas melakukan penatausahaan kegiatan Atase Pertanian;
3. Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggal Biro Kerja Sama Luar Negeri

3. Visi dan Misi

Visi Biro Kerja Sama Luar Negeri adalah menjadi institusi terdepan dalam melaksanakan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang sehat, berintegritas dan dinamis.

Misi Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif.
2. Menyusun rumusan kebijakan kerja sama luar negeriyang mendukung Strategi Induk pembangunan pertanian nasional.
3. Menyusun program dan perencanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral.
4. Meningkatkan peran sebagai *leading* diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum Internasional.
5. Mendiseminasikan hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan.
6. Memantau dan mengevaluasi hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian.
7. Melaksanakan fungsi pelayanan organisasi yang prima.

2. Tujuan

Tujuan organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri periode tahun 2015 -2019, sebagai berikut :

1. Untuk menunjang tugas pertanian dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian di dunia internasional serta untuk mendorong meningkatnya ekspor produk pertanian.
2. Untuk menunjang perjuangan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan dunia melalui forum bilateral, regional dan multilateral.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia pertanian baik petani ataupun birokrat dengan memanfaatkan peluang kerja sama dibidang pendidikan dan latihan dengan negara mitra baik dalam forum bilateral, regional maupun multilateral.
4. Meningkatkan kerjasama bidang pertanian melalui pertemuan / sidang-sidang untuk meningkatkan pembangunan pertanian yang secara luas dapat meningkatkan kesejahteraan para petani baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral.
5. Menggali dan memanfaatkan peluang kerja sama melalui kerangka kerjasama bilateral, regional maupun multilateral untuk peningkatan kerja sama internasional bidang pertanian dalam rangka peningkatan kerja sama teknik maupun kerja sama perdagangan dan investasi sektor pertanian.
6. Menunjang diplomasi politik melalui pertanian dalam rangka membela Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Menyediakan data dan analisis yang mendukung kegiatan peningkatan kerja sama luar negeri bidang pertanian, menyusun laporan kinerja dan menyiapkan bahan laporan pimpinan yang terkait dengan kerja sama luar negeri bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan audit laporan keuangan dan audit kinerja birokrasi.

3. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terciptanya mutu pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif .
2. Tersusunnya rumusan kebijakan kerja sama luar negeri yang mendukung *Strategi Induk* pembangunan pertanian.

3. Tersusunnya program dan perencanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerja sama bilateral, regional dan multilateral.
4. Terwujudnya peran sebagai *leading* diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum Internasional.
5. Terdiseminaskannya hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan.
6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian.
7. Terlaksananya fungsi pelayanan organisasi yang prima.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pusat Kerja Sama Luar Negeri selama Bulan Mei 2016, dapat dilaporkan sebagai berikut :

2.1. BAGIAN BILATERAL

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

Rapat Pembahasan dan Koordinasi Dalam Rangka Kerja Sama Bilateral

1. Pertemuan Kepala Biro KLN dengan Minister Plenipotentiary Commercial Kedutaan Mesir di Jakarta Mr. Amin Sabri, tanggal 20 Juni 2016 di Biro KLN Kementerian Pertanian Jakarta

Menghadiri Rapat, Seminar, Lokakarya, dan Lain-lain

1. Menghadiri rapat The Sharing Knowledge on EU-Vietnam Free Trade Agreement tanggal 3 Juni 2016 di Kementerian Perdagangan Jakarta
2. Menghadiri rapat Persiapan pelaksanaan Joint Study on Palm Oli between Indonesia – USA tanggal 3 Juni 2016 di Kementerian Luar Negeri Jakarta
3. Menghadiri rapat Pleno Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemanjapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemberian Prefensi Perdagangan kepada Negara Kurang Berkembang, tanggal 9 Juni 2016 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta
4. Menghadiri rapat Persiapan *Monitoring and Evaluation* di Gambia dan Rencana Pelatihan Pertanian di Nigeria, tanggal 15 Juni 2016 di Kementerian Luar Negeri Jakarta
5. Menghadiri rapat Persiapan *Monitoring and Evaluation* di ARFTC Gambia dan Pelaksanaan *Workshop AU-ECOSOC “Back to Farm Project”* di Nigeria, tanggal 27 Juni 2016 di Kementerian Pertanian Jakarta

2.2. BAGIAN REGIONAL

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. The 4th COMCEC Working Groups Focal Points Meeting, tanggal 1-2 Juni 2016 di Ankara Turki
2. Pertemuan Teknis *Protocol to Amend dan Annex on DSM of D8 PTA*, tanggal 16 Juni 2016 di Hotel Permata Bogor

Rapat Pembahasan dan Koordinasi Dalam Rangka Kerja Sama Regional

1. Koordinasi Kerjasama ASEAN, tanggal 14-15 Juni 2016 di Bogor
2. Koordinasi Kerjasama Regional, tanggal 16-18 Juni 2016 di Makasar Sulawesi Selatan
3. Koordinasi Kerjasama NON ASEAN di dalam negeri, tanggal 27-29 Juni 2016 di Banten

Menghadiri Rapat, Seminar, Lokakarya, dan Lain-lain

1. Menghadiri Pertemuan *The 7th EWG-GAP* 1-3 Juni 2016, Hotel Aston Primera Pasteur, Bandung
2. Menghadiri rapat Tindak Lanjut Pembentukan Tim Informasi Publik terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN, tanggal 1 Juni 2016 di Kementerian Koordinator Perekonomian Negeri Jakarta
3. Menghadiri rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan *3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Business Conference*, tanggal 14 Juni 2016 di Kementerian Koordinator Perekonomian Negeri Jakarta

2.3. BAGIAN MULTILATERAL

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. G20 Agriculture Deputies Meeting dan G20 Agriculture Ministers Meeting, tanggal 1-3 Juni 2016 di Xi'an RRT

Rapat Pembahasan dan Koordinasi Dalam Rangka Kerja Sama Multilateral

1. Workshop dan Penyusunan Road Map for Action Packages Global Health Security Agenda, tanggal 15-16 Juni 2016 di Novotel Hotel Bogor
2. Koordinasi Kerjasama OIP, tanggal 16-18 Juni 2016 di Bali
3. Koordinasi Tindak Lanjut Kerja Sama dengan lembaga CIMMYT, tanggal 16-18 Juni 2016 di Makasar Sulawesi Selatan
4. Koordinasi Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Lembaga Penelitian CIP, tanggal 20-22 Juni 2016 di Malang Jawa Timur
5. Koordinasi WIPO tanggal 23-24 Juni 2016 di MPIG Sumedang
6. Rapat Jaring Masukan WIPO, tanggal 29 Juni 2016 di Hotel Akmani
7. Koordinasi Persiapan Calon Lokasi HPS ke-37 tahun 2017, tanggal 27 – 29 Juni 2016 di Pontianak Kalimantan Barat

Menghadiri Rapat, Seminar, Lokakarya, dan Lain-lain

1. Menghadiri rapat Koordinasi SPS dalam rangka Persiapan Sidang Komite SPS ke-66 tanggal 30 Juni – 1 Juli 2016 di Jenewa, Swiss, tanggal 7 Juni 2016 di Badan Karantina Pertanian Jakarta
2. Menghadiri Rapat Koordinasi Tim Perizinan Ormas Asing, tanggal 9-10 Juni 2016 di Hotel Novotel Bogor
3. Menghadiri rapat Pembahasan Keanggotaan Indonesia pada CGIAR *System Council*, tanggal tanggal 10 Juni 2016 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta

4. Menghadiri rapat Peran Penting dan Perkembangan Indikasi Geografis Produk Pertanian Indonesia tanggal 10 Juni 2016 di BB Biogen Bogor
5. Menghadiri rapat Kerjasama antara Balitbangtan dan CIAT, tanggal 22 Juni 2016 di Badan Litbang Pertanian

2.4. BAGIAN PENGELOLAAN PHLN DAN ATANI

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Workshshop Pengelolaan PHLN dengan Lembaga Donor, tanggal 18-20 Mei 2016 di Hotel Nagoya Hill Batam
2. Pertemuan Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.tanggal 17 Juni 2016 di Hotel Aston Makasar
3. Pertemuan Koordinasi Evaluasi PHLN Lingkup Kementerian Pertanian, tanggal 23 Juni 2016 di Hotel Savoy Bandung

Rapat Pembahasan dan Koordinasi Dalam Rangka PHLN dan Atase Pertanian

1. Rapat Rekonsiliasi Kegiatan Proyek CF-SKR Tahun 2015, tanggal 9 – 10 Mei 2016 di BB Biogen Jakarta
2. Rapat Pendahuluan Rekonfirmasi Penarikan T. A 2017 dan Proyeksi Maju Penarikan PHLN 2018-2021, tanggal 9 Juni 2016 di Biro KLN Kementan Jakarta

Menghadiri Undangan Rapat, Seminar, Lokakarya dan lain-lain

1. Menghadiri pembahasan Draft Revisi Pedoman Administrasi Keuangan (PAK), tanggal 30-31 Mei 2016 di Padepokan Volli Sentul
2. Menghadiri rapat Rekonfirmasi Perubahan Penarikan T.A 2017 dan Rencana Maju Penarikan 2018-2021, tanggal 14 Juni 2016 di Kementerian Keuangan Jakarta
3. Menghadiri persiapan Penyusunan Aplikasi RKAKL-ADIK Tahun Anggaran 2016, tanggal 21 Juni 2016 di Bogor
4. Menghadiri Sosialisasi Program Taspen dan BPJS bagi ASN, tanggal 22 Juni 2016 di PPMKP Bogor

5. Menghadiri Rekonsiliasi data dan Informasi BMN, tanggal 23 Juni 2016 di Bogor
6. Menghadiri Bimtek Verifikator Laporan Keuangan dan Koordinasi Persiapan Penyusunan LK Semester I TA. 2016 Tk. UAPPA-E1 Setjen, tanggal 28 Juni 2016 di Bogor

Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)

Penugasan pejabat/pegawai Kementan ke luar negeri sebanyak 72 orang yaitu mengikuti Workshop/seminar sebanyak 10 orang, menghadiri pertemuan/sidang sebanyak 22 orang, melakukan kunjungan kerja sebanyak 6 orang, mengikuti pelatihan/training sebanyak 22 orang, program S2 sebanyak 6 orang dan program S3 sebanyak 6 orang

2.5. ATASE PERTANIAN ROMA

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Pertemuan Bapak Dubes dengan Piombino Port Authority, tanggal 3 Mei 2016 di Roma
2. Pertemuan Nobel Peace Laureates Alliance for Food Security and Peace, tanggal 11 Mei 2016 di Roma
3. Seminar Peluang dan Investasi Perdagangan di Indonesia, tanggal 16-17 Mei 2016 di Montava
4. Video Conference SVLK, tanggal 19 Mei 2016 di Roma
5. Rapat internal persiapan Resepsi Diplomatik tahun 2016 Asia Grup Meeting, FAO, tanggal 23 Mei 2016 di Roma
6. *Launching* Promosi Indonesia/Produk Pertanian di Jumbo Tram dan Bus tanggal 27 Mei 2016 di Milan
7. FAO Council ke-154, tanggal 30 Mei 2016 di Roma

2.6. ATASE PERTANIAN WASHINTON DC

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Rapat Internal KBRI dipimpin Dubes, tanggal 1 Juni 2016 di KBRI
2. Asia Fiesta 2016 tanggal 5 Juni 2016 di Washington DC
3. Pertemuan dengan American Jewish Committee (AJC) tanggal 5 Juni 2016 di Wisma
4. Pertemuan dengan Maryland Dept of Agriculture dan Mie Mie JS, tanggal 7 Juni 2019 di KBRI
5. Pertemuan internal dipimpin Dubes, tanggal 7 Juni 2016 di KBRI
6. Pertemuan dengan Acha Production di pimpin Dubes, tanggal 9 Juni 2016 di KBRI
7. Rapat Persiapan Peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 13 Juni 2016 di KBRI
8. Pertemuan penyusunan konsep brafak Diplomasi Ekonomi, tanggal 13 Juni 2016 di KBRI
9. World Tea Expo tanggal 14-17 Juni 2016 di Las Vegas
10. Pertemuan dengan Mr. Russell Knight dari FAS, tanggal 20 Juni 2016 di kantor USDA
11. Pertemuan dengan Mr. Jeremiah Gracia, Economic Dev, City of Dublin tanggal 21 Juni 2016 di KBRI
12. Pertemuan dengan The MOAK Group di organisir Atase Perhubungan tanggal 22 Juni 2016 di KBRI
13. Summer Fancy Food Show (FFS), tanggal 25-28 Juni 2016 di New York

14. 2016 Agricultural Attache Roundtable tanggal 30 Juni 2016 di kantor US-ABC

15. Rapat Koordinasi Kegiatan KBRI, tanggal 30 Juni 2016 di KBRI

LAPORAN BULANAN BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI

PERIODE BULAN JUNI 2016

NO.	TANGGAL DAN TEMPAT	KEGIATAN	PIHAL YANG TERLIBAT	HASIL KEPUTUSAN	TINDAK LANJUT
------------	---------------------------	-----------------	----------------------------	------------------------	----------------------

BAGIAN BILATERAL					
1.	3 Juni 2016 Kementerian Perdagangan RI	The Sharing Knowledge on EU-Vietnam Free Trade Agreement.	Kementerian/Lembaga	Sharing experience yang telah dilakukan oleh VietNam dalam mencapai kesepakatan untuk melakukan perundingan FTA dengan Uni Eropa Belajar dari pengalaman yang dimiliki oleh VietNam dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi Indonesia dalam melakukan perundingan dengan UE.	Saat ini pihak EU sedang mengkomunikasikan secara internal pada parlemen EU untuk tindaklanjut perundingan Indonesia – EU CEPA.
2.	3 Juni 2016 Kementerian Luar Negeri RI	Persiapan pelaksanaan Joint Study on Palm Oli between Indonesia - USA	IPB, Kementan dan Kemlu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan untuk melakukan perundingan kembali kajian bersama antara Indonesia dengan Amerika Serikat untuk dampak kelapa sawit. 2. Para peneliti kedua belah pihak akan melakukan kajian bersama terhadap dampak karbon yang disebabkan oleh tanaman kelapa sawit di lahan gambut. 	Indonesia akan berusaha membiayai kegiatan penelitian dari sisi aktifitas yang dilakukan oleh para peneliti Indonesia. Hal ini untuk menjamin hasil penelitian tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh pihak Amerika Serikat.
3.	09 Juni 2016 Kementerian Hukum dan Hak Asisi Manusia	Rapat Pleno Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemberian Prefensi Perdagangan kepada Negara Kurang Berkembang	Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hubungan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tanggal 09 Juni 2016 telah diselenggarakan Rapat Pleno guna mensosialisasikan dan memperoleh masukan dari Kementerian terkait. 2. Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan Presiden, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlapping). Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan.. 	Hasil dari rapat kepada Kementerian terkait agar memberikan tanggapan melalui email.
4.	15 Juni 2016 Kementerian Luar Negeri	Rapat Persiapan <i>Monitoring and Evaluation</i> di Gambia dan Rencana	Direktorat Kerjasama Teknis, , Direktorat Afrika	1. Pada tanggal 15 Juni 2016 telah diselenggarakan Rapat Rencana Revitalisasi	Hasil rapat akan disampaikan kepada Kementerian terkait.

		Pelatihan Pertanian di Nigeria	Kemenlu, Kementerian PUPR, Biro KLN dan BPPP SDM Kementan,	<p>ARFTC (<i>Agriculture Rural Farmer Training Center</i>), sebagai tindak lanjut, Dit. KST menyelenggarakan International training Workshop on Agriculture Sector for African in Jenoi, Gambia pada tanggal 21-29 Maret 2016, berencana mengadakan kegiatan <i>monitoring and evaluation</i> sekaligus meninjau kemungkinan untuk melakukan perbaikan fisik ARFTC dengan K/L terkait yang rencananya akan dilakukan bulan juli minggu ke 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kementerian PU mendukung rencana Revitalisasi ARFTC sebagai bagian dari eksistensi Indonesia selama ini di Gambia, guna mengimplementasikan rencana ini sehingga menjadikan sebagai Standar Training Center untuk wilayah Afrika bagian Barat dan Timur. 3. Rencana Pelatihan Pertanian di Nigeria, menindaklanjuti permohonan bantuan teknis dari <i>Economic Social and Cultural Council (ECOSOC)</i> African Union untuk program <i>Back to Farm</i>, yang akan direncanakan pada bulan juli minggu ke-3 tahun 2016. 4. Biro Kerjasama Luar Negeri mendukung rencana workshop di Nigeria dengan kesiapan Narasumber (Peneliti) dari Puslantan SDM, Kementerian Pertanian. 5. Badan SDM, Puslantan Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan Litbang Kementerian Pertanian, untuk kesiapan Narasumber (Peneliti) dan membuat matriks untuk pelaksanaan Workshop di Nigeria. 	
--	--	--------------------------------	--	---	--

5.	20 Juni 2016 Ruang Biro KLN	Pertemuan Kepala Biro KLN dengan Minister Plenipotentiary Commercial Kedutaan Mesir di Jakarta Mr. Amin Sabri	KB Mesir dan Biro KLN	<p>Beberapa hasil pertemuan tersebut yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sehubungan akan berakhirnya penugasan di Indonesia, Mr. Amin Sabri bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama selama ini telah berjalan dengan baik 2. Mengharapkan agar segala sesuatu yang telah disepakati dan diusulkan dapat direalisasikan oleh kedua pihak. Terutama terkait rencana pertemuan Forum Bilateral bidang pertanian I RI-Mesir yang tertunda sejak tahun 2015. 3. MoU Kerjasama Pertanian antara Pemerintah Indonesia dan Mesir telah habis masa berlakunya , sehingga disepakati untuk menyusun kembali MoU Bidang pertanian antara kedua Negara. 4. Kedutaan Mesir di Jakarta akan tetap terus berkordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk isu-isu pengembangan kerjasama kedua Negara 	Biro KLN akan menyusun draft MoU kerjasama bidang pertanian untuk disampaikan ke Pihak Mesir melalui Kedutaan Mesir di Jakarta
6.	27 Juni 2016 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia	Rapat Persiapan <i>Monitoring and Evaluation</i> di ARFTC Gambia dan Pelaksanaan <i>Workshop AU-ECOSOC "Back to Farm Project"</i> di Nigeria	Kementerian Luar Negeri, Direktorat Kerjasama Teknis, Direktorat Afrika, Kementerian Luar Negeri, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Biro KLN, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian, Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara dan Ketua Yayasan Amal Masyarakat Petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tanggal 27 Juni 2016 telah diselenggarakan Rapat Rencana Revitalisasi ARFTC (<i>Agriculture Rural Farmer Training Center</i>), sebagai tindak lanjut, rapat tanggal 15 Juni 2016 2. Kementerian PU mendukung rencana Revitalisasi ARFTC sebagai bagian dari eksistensi Indonesia selama ini di Gambia, hanya masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan mengenai aturan melakukan Revitalisasi di Luar Negeri. 3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Peranian, menindaklanjuti 	Hasil rapat akan disampaikan kepada Kementerian terkait dan menunggu Delegasi dari masing-masing K/L.

			Indonesia (YAMPI)	<p>Pelatihan Pertanian di Nigeria disarankan berupa Workshop yang akan di adakan 1–2 hari.</p> <p>4. Biro Kerjasama Luar Negeri mendukung rencana workshop di Nigeria Kementerian Pertanian.</p>	
BAGIAN REGIONAL					
1.	1-2 Juni 2016 Ankara Turki	The 4 th COMCEC Working Groups Focal Points Meeting	Kemdag, Kemtan, KBRI Ankara dan Negara anggota COMCEC OKI	<p>1. Pada pembahasan agenda <i>COMCEC Strategy and Its Implementation: The Status of Progress</i>, Mr. Kagan AKDOGAN, <i>Expert</i>, CCO (COMCEC <i>Coordination Office</i>), menjelaskan tentang strategi COMCEC dan status perkembangan dari 2013-2016. Dalam mewujudkan strategi COMCEC, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya: menyusun studi analisis berdasarkan tema strategis yang diusung dalam setiap WG, rekomendasi kebijakan, dan pemanfaatan PCM.</p> <p>2. Terkait status pemanfaatan PCM oleh negara anggota, <i>COMCEC Project Funding</i> telah diikuti oleh 49 negara anggota. Sebanyak 14 proyek <i>COMCEC Project Funding</i> telah berhasil dilaksanakan pada tahap <i>Second Project Call</i> tahun 2015. Pada tahap <i>Third Project Call</i>, 10 proyek dari negara anggota telah masuk sebagai <i>final-listed</i> dan saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan.</p> <p>3. Pada pembahasan agenda <i>The Role of COMCEC Focal Points in the Realization of the COMCEC Strategy</i>, Mr. Selcuk KOC, Direktur, CCO, menginformasikan kembali pentingnya peranan focal points dalam mewujudkan pencapaian strategi COMCEC melalui komunikasi yang efektif dalam usulan</p>	<p>Dalam rangka menghadapi pertemuan-pertemuan WG yang akan dilaksanakan pada periode September-Oktober 2016, diharapkan <i>focal point</i> dari masing-masing WG di Kementerian/Lembaga terkait dapat berpartisipasi dan berperan lebih aktif. Selain itu, Indonesia dapat mengajukan usulan proyek pada <i>fourth project call COMCEC Project Funding</i> di bulan September 2016 mendatang. K/L terkait yang tertarik dengan proyek kerja sama ini diharapkan dapat segera mempersiapkan materi dan anggaran yang diperlukan.</p>

				<p>tema yang akan diusung oleh WG, evaluasi implementasi kebijakan/rekomendasi, hingga pemanfaatan PCM sebagai salah satu mekanisme pencapaian strategi COMCEC.</p> <p>4. Pada sesi <i>briefing and discussion on the themes of the Agriculture Working Group for 2017-2019</i>, pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari Cote d'Ivoire, Indonesia, Iran, Palestina, Saudi Arabia, Tunisia, dan Turki, serta CCO.</p> <p>5. CCO mempresentasikan beberapa tema yang telah diusung oleh Agriculture WG pada tahun 2013-2016, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Increasing Agricultural Productivity in the COMCEC Region: Improving Irrigation Capacity" (2013/1)</i> ○ <i>"Encouraging Foreign Direct Investments (FDIs) in the COMCEC Region for Increasing Agricultural Productivity" (2013/2)</i> ○ <i>"Improving the Statistical Capacity of the Agriculture Sector in the COMCEC Region." (2014/1)</i> ○ <i>"Facilitating Smallholder Farmers' Market Access in the OIC Member Countries" (2014/2)</i> ○ <i>"Improving Institutional Capacity: Strengthening Farmer Organizations in the OIC Member Countries." (2015/1)</i> ○ <i>"Promoting Agricultural Value Chains in the OIC Member Countries."(2015/2)</i> ○ <i>"Reducing On-Farm Food Losses in the OIC Member Countries" (2016/1)</i> ○ <i>"Reducing Post-harvest food losses in the OIC Member Countries", (2016/2)</i> yang akan dibahas pada bulan Oktober 2016 mendatang. 	
--	--	--	--	--	--

				<p>6. Kemudian, CCO juga menekankan kembali peranan focal points dan manfaat yang diperoleh dari mekanisme WG, diantaranya: sebagai sarana diseminasi pengetahuan, berbagi pengalaman dan best-practices, sebagai refleksi pelibatan institusi internasional lainnya dan juga pihak swasta, dan penyusunan rekomendasi kebijakan.</p> <p>7. Tema yang akan diusulkan untuk tahun 2017-2019 hendaknya mempertimbangkan keterkaitan dengan strategi COMCEC, respon/keinginan dari negara anggota, dan hasil dari studi analisis yang telah dilakukan oleh CCO. Berdasarkan tiga hal tersebut CCO mengusulkan tema 2017-2019 untuk <i>Agriculture WG</i> sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Reducing Food Waste in the OIC member countries (2017/1)</i> ○ <i>Improving agriculture Agricultural Market Performance Creation and Development of Market Institution (2017/2)</i> ○ <i>Establishing an agricultural market information system in the OIC member countries (2018/1)</i> ○ <i>Promoting market oriented agricultural extension and consultation services in the OIC (2018/2)</i> ○ <i>Agricultural support policies and subsidies in the OIC Member Countries (2019/1)</i> ○ <i>Agricultural foreign trade policies in the OIC member countries (2019/2)</i> <p>8. Dalam sesi diskusi, Palestina mengusulkan riset dan pengembangan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Indonesia mendukung usulan ini, mengingat keterkaitan peningkatan produktivitas pertanian dengan rencana</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>strategis pembangunan pertanian Indonesia 2015-2019. Indonesia juga memberikan beberapa intervensi terhadap usulan tema ini, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ mendukung setiap kebijakan/rekomendasi yang telah dihasilkan oleh WG. Adapun kebijakan/rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan WG ke-4,5,6 telah sesuai dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. ○ Terkait dukungan terhadap usulan Palestina, Indonesia menyampaikan usulan perubahan tema pada 2017/2, menjadi <i>"increasing agriculture productivity through research and development"</i> dengan fokus pada pengembangan peternakan. Hal ini didasarkan pada adanya keinginan BBPP Batu dan BBIB Singosari (secara informal) untuk memanfaatkan skema PCM tahun 2017. ○ Indonesia menyampaikan bahwa untuk tahun 2016 ini akan memasukan proposal dengan tema <i>"sustainable livestock farming through strengthening of artificial insemination to increase the welfare of small-holder farmers in OIC member countries"</i> (informasi dari BBIB Singosari). Pengajuan proposal akan dilakukan secara online pada bulan September 2016. ○ Indonesia juga mengusulkan isu upaya pertanian dalam memitigasi perubahan iklim untuk masuk sebagai salah satu tema yang akan diusung oleh Agriculture WG, namun hal ini dinilai bersifat <i>cross-cutting issue</i> oleh CCO dan perwakilan Negara anggota yang hadir, sehingga isu ini tidak 	
--	--	--	--	--	--

				dilanjutkan pembahasannya.	
2.	1-3 Juni 2016/ Hotel Aston Primera, Bandung	Menghadiri Pertemuan <i>The 7th EWG-GAP</i> 1-3 Juni 2016, Hotel Aston Primera Pasteur, Bandung	Perwakilan dari GIZ. Delegasi Indonesia terdiri dari wakil-wakil Sekditjen. Tanaman Pangan, Sekditjen. Hortikultura, Direktorat buah dan florikultura, dan Biro Kerja Sama Luar Negeri.	<p>1. EWG-GAP merupakan <i>sub-working group</i> dibawah ASEAN <i>Sectoral Working Group on Crops</i> (ASWGC) yang ditujukan untuk membahas harmonisasi regulasi dan peraturan-peraturan standar teknis yang terkait dengan GAP antar negara anggota ASEAN. Pertemuan ini merupakan pertemuan tahunan yang diikuti oleh masing-masing <i>Experties</i> dari AMS;</p> <p>2. Pada pembahasan <i>Strategic Plan of Action</i> (SPA), pertemuan sepakat untuk merevisi draft Strategic Plan of Action for the ASEAN Cooperation on Good Agricultural Practices (GAP) (2016-2020). Selain itu, pertemuan sepakat untuk mengadopt visi dan tujuan dari FAF, dan sepakat untuk mengadopt 4 (empat) <i>Strategic Thrust</i> (ST) dan 7 (tujuh) ST yang diajukan oleh ATF-FAF yang terkait langsung dengan EWG-GAP, yaitu:</p> <p><i>i. ST 1 : Enhance Quantity/Quality of Production with Sustainable "green" Technologies, Resource Management Systems, and Minimise Pre-and Post-harvest Losses and Waste;</i></p> <p><i>ii. ST 2 : Enhance Trade Facilitation, Economic Integration and Market Acces;</i></p> <p><i>iii. ST 5 : Assist Resource Constrained Small Producers and SMEs to Improve Productivity, Technology and Product Quality, to meet Global Market Standards and Increase Competitiveness.</i></p>	Biro Kerja Sama Luar Negeri perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura selaku <i>Focal Point/</i> Penanggung Jawab kerjasama ASEAN <i>Crops</i> perihal masukan terhadap <i>draft inception Report Study on Mutual Recognition Models for ASEAN Agricultural Best Practices.</i>
3.	1 Juni 2016; Kemenko Perekonomian, Jakarta	Rapat Tindak Lanjut Pembentukan Tim Informasi Publik terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN	Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kem Luar Negeri; Kem Pertanian;	1. Rapat menginformasikan bahwa selama ini terkait informasi MEA Kemkoinfo telah melakukan koordinasi dengan AEC Center,	1. Pimpinan rapat akan menyampaikan draft revisi SK Tim Informasi Publik MEA ke

			Kem. Perindustrian; Kem. Kominfo; Kem. Pariwisata, BKPM, Kemhub; Kem. KUKM; Badan Ekonomi Kreatif; dan BSN	<p>Kemdag. Selain itu juga terdapat Kantor Berita Antara (Biro Antara) yang melakukan liputan tentang MEA dan media online seperti facebook, twitter. Juga beberapa daerah telah menerima bantuan untuk peliputan berita MEA. Kominfo menghimbau agar K/L dapat memberi tahu informasi yang akan diolah dan kebijakan pemerintah terkait MEA. Secara nasional, apabila masing-masing K/L melakukan sosialisasi dan membuat informasi publik sebaiknya dapat memberikan bahan-bahan tersebut ke kominfo.</p> <p>2. Wakil Kementan melaporkan bahwa telah 2 (dua) kali melakukan sosialisasi yaitu untuk wilayah Indonesia Barat di Sumatera tepatnya di Medan dan Wilayah Indonesia Timur di Mataram, Lombok. Diseminasi informasi MEA dilakukan melalui dinas pertanian provinsi/kabupaten/kota, serta para akademisi dan mahasiswa pertanian.</p> <p>3. Pimpinan menginformasikan bahwa iklan layanan masyarakat terkait publikasi MEA dapat berdampak maksimal jika melalui media elektronik dalam hal ini televisi.</p>	<p>setiap Kementerian/Lembaga untuk ditanggapi.</p> <p>2. Setiap K/L dapat menyampaikan iklan publikasi MEA minimal yang berdurasi 30 menit ke AEC Center.</p>
4.	14 Juni 2016 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan <i>3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Business Conference</i>	<p>Perwakilan Daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Sumatera Selatan, Aceh, Riau dan Lampung.</p> <p>Perwakilan K/L perwakilan dari beberapa K/L terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata,</p>	<p>1. <i>Trade Expo</i> akan dilaksanakan selama 3 hari, dengan menampilkan produk-produk barang/jasa maritim, Perikanan dan olahannya, Pertanian dan olahannya, <i>Services</i> (termasuk pariwisata), Industri, <i>Handycraft</i>, dan <i>Infrastructure (logistics)</i>. Penyelenggara menyiapkan 280 booth, masing-masing Negara anggota BIMP-EAGA dan IMT-GT (Brunei Darussalam, Malaysia, Philippine dan Thailand) memperoleh 40 booth, untuk negara partner (Northern Territory, China, Japan, Timor Leste) masing-masing 5 booth</p>	<p>1. Seknas KESR akan mengadakan rapat persiapan lanjutan dalam waktu dekat. Untuk itu, K/L yang terlibat dalam kegiatan ini diharapkan dapat mulai melakukan konfirmasi peserta pameran yang ikut serta dalam kegiatan <i>Trade Expo</i> maupun <i>Business Matching</i>. Peserta diharapkan dapat menyampaikan <i>company profile/ product description</i>,</p>

			<p>Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Keuangan (Bea Cukai) Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM dan Biro KLN Kementerian Pertanian. Selain Instansi Pemerintah, turut hadir perwakilan dari beberapa sector swasta/ BUMN diantaranya perwakilan Garuda Indonesia, IWAPI, serta PT. Mediatama Binakreasi selaku EO acara dimaksud</p>	<p>sedangkan 100 <i>booth</i> lainnya diperuntukkan Indonesia. Adapun biaya sewa <i>booth</i> standar dengan ukuran 2x3m² untuk peserta asing USD 500/<i>booth</i> dan Rp.7.500.000/<i>booth</i> (termasuk pajak) untuk peserta Indonesia.</p> <p>2. Dilaporkan beberapa negara anggota BIMP-EAGA dan IMT-GT serta negara-negara partner yang sudah melakukan konfirmasi keikutsertaan dan partisipasinya dalam kegiatan ini, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filipina 30 <i>booth</i>, dengan special design dan perlengkapan tambahan (aquarium, freezer, rak) • Brunei Darussalam 10 <i>booth</i>, design <i>semi-improved</i> dan pengaturan <i>shuttle bus</i> • Malaysia Masih dalam proses peninjauan • Thailand Masih dalam proses peninjauan • Negara partner Masih dalam proses peninjauan <p>3. Selain itu, diperoleh juga konfirmasi dari beberapa instansi dan K/L terkait yang sudah mengkonfirmasi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perdagangan: 15 <i>booth</i> • Kementerian Perindustrian: 10 <i>booth</i> • Kementerian Pertanian: 10 <i>booth</i> • Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan: 15 <i>booth</i> • Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara: 4 <i>booth</i> • Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur: 1 <i>booth</i> 	<p>untuk mempermudah pendataan dan kepentingan lainnya lebih lanjut.</p> <p>2. Kementerian Pertanian perlu segera menindaklanjuti persiapan partisipasi dalam trade expo ini, khususnya untuk sewa <i>booth</i> yang <i>deadlinenya</i> tanggal 23 Juli 2016.</p>
--	--	--	---	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Propinsi Aceh: 2 booth • Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan: 5 booth • Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu: 2 booth • Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI): 20 booth <p>4. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sudah melakukan persiapan matang untuk kesuksesan acara ini. Pemda Sulsel menyiapkan tenaga medis yang siap siaga selama berlangsungnya kegiatan. Para peserta akan dibawa <i>city tour</i> ke beberapa tempat, seperti: Bantimurung, Malino, Benteng Rotterdam, Pusat <i>Souvenir</i> Somba Opu dan Pusat Belanja Karebosi <i>Link</i>. Pemda Sulsel akan menjamu seluruh tamu pada acara <i>Dinner</i> yang akan dilaksanakan 2 (Dua) kali, oleh Gubernur dan Walikota.</p> <p>5. Pimpinan rapat menyampaikan, bahwa pertemuan Preparatory SOM BIMP-EAGA akan dilaksanakan di Makassar, sebelum pelaksanaan <i>Trade Fair</i>, tepatnya pada tanggal 12-13 Oktober 2016.</p> <p>6. Perwakilan Biro KLN menyampaikan perlunya surat resmi dari Kemenko Perekonomian untuk penayangan website BIMP-EAGA & IMT-GT <i>Tade Expo</i> www.eagaimtexpo2016.com di website Kementerian Pertanian, dan dukungan kelancaran untuk <i>clearance</i> produk pertanian dari Badan Karantina Pertanian yang akan didatangkan dari luar negeri.</p>	
5.	14-15 Juni 2016/ Bogor	Koordinasi Kerjasama ASEAN	Perwakilan dari Biro KLN, Kementerian Perdagangan	Salah satu kerjasama ASEAN di bidang perdagangan adalah <i>Coordinating Committee on Implementation ASEAN Trade in Goods</i>	Biro KLN akan berkoordinasi dengan tim tarif terkait komoditas beras dan gula untuk 5 (lima) tahun

				<p><i>Agreement</i> (ATIGA). Komite ini membahas berbagai isu strategis dan isu prioritas terkait ATIGA sebagai dasar hukum perjanjian perdagangan barang di ASEAN dalam mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi di ASEAN</p>	mendatang.
6..	16 Juni 2016, Hotel Permata, Bogor	Pertemuan Teknis <i>Protocol to Amend dan Annex on DSM of D8 PTA</i>	Kemlu, Kemdag, BANI, Kemenkeu, Kemtan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan dibuka oleh Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional, Kementerian Perdagangan dan dihadiri oleh wakil/pejabat dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan. Kementerian Perdagangan diwakili oleh wakil/pejabat dari Biro Advokasi Perdagangan, Biro Hukum dan Dit. Perundingan Multilateral. 2. Pada pembukaan, Direktur PAOI menyampaikan bahwa isu di D-8 merupakan isu yang low hanging fruit. Sebagai kawasan yang relatif berkembang, Indonesia berpeluang menjadi pemain besar sebagai arsitektur perdagangan di D-8 yang merupakan pasar non tradisional dan masih dapat terus berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan peran keaktifan Indonesia untuk membangun arsitektur kawasan dunia muslim, peran yang tidak mungkin dapat diambil oleh negara besar lainnya. 3. Dalam rangka persiapan implementasi PTA D-8 yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2016—Malaysia dan Turki telah menotifikasi kesiapan implementasi kepada Sekretariat D-8—Supervisory Committee (SC) D-8 melaksanakan pertemuan Special Session of the D-8 PTA pada tanggal 30-31 Mei 2016 di Istanbul, Turki. Hasil pertemuan memerlukan tindak lanjut sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan first draft Protocol Establishing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dit. PAOI akan melakukan koordinasi dengan Dit. Fasilitas Ekspor Impor serta Dit. Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga dan Dit. Teknis Kepabeanan, Kementerian Keuangan untuk membahas lebih lanjut terkait isu-isu dalam Rules of Origin dan Operational Certification Procedures, serta form SKA PTA D-8. 2. Dit. Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Kemenkeu akan menindaklanjuti pembuatan proposal/non-paper permasalahan isu-isu Rules of Origin, Operational Certification Procedures dan format SKA untuk disampaikan kepada Sekeretary D-8 3. K/L terkait agar menindaklanjuti kebutuhan kajian tentang dampak proposal LCV 30% oleh Bangladesh dan mencari instrumen/perangkat lain untuk mengakomodir

				<p>Annex on Dispute Settlement Mechanism sebelum tanggal 30 Juni 2016 oleh Indonesia;</p> <p>b. Konfirmasi posisi Indonesia terkait proposal Local Content Value (LCV) 30% dari Bangladesh; dan</p> <p>c. Menetapkan posisi Indonesia pada pertemuan customs officials yang rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan Agustus 2016.</p> <p>4. Pada pembahasan pertemuan customs officials, rapat membahas hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menindaklanjuti ketentuan Operational Certification Procedures (OCP) yang selama ini menjadi kendala dan dengan mempertimbangkan keberhasilan Indonesia pada pembahasan agenda finalisasi DSM, maka pada isu ini Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, diharapkan dapat membuat suatu proposal/non-paper yang isinya membahas tentang permasalahan Indonesia disertai penjelasan kajian yang telah dilakukan pada Ketentuan dimaksud. Proposal/non-paper ini dapat diserahkan kepada Sekretariat sebelum pertemuan customs officials untuk dimintai tanggapan secara tertulis oleh Negara anggota dan dibahas kemudian pada pertemuan selanjutnya di Pakistan. Strategi ini mungkin akan lebih efektif, sambil menunggu pelaksanaan pertemuan customs officials.</p> <p>b. Terkait isu <i>importation by installment</i> perlu dibuatkan opsi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kajian dan argumen Indonesia terkait pelaksanaan ketentuan dimaksud serta opsi posisi 	kebutuhan tersebut tanpa merugikan kepentingan nasional.
--	--	--	--	--	--

				<p>Indonesia selanjutnya apabila ternyata ketentuan ini dapat dijalankan oleh negara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan protokol perubahan naskah OCP PTA D-8. Sesuai mandat Pasal 14 OCP, persetujuan amandemen hanya membutuhkan kesepakatan secara konsensus atau voting di tingkat <i>Supervisory Committee (SC) D-8</i>. <p>5. Pada pembahasan proposal permintaan LCV 30% untuk LDCs oleh Bangladesh, disampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada pertemuan special session, Iran, Malaysia, Pakistan dan Turki mendukung usulan Bangladesh, karena negara tersebut telah menjadi Negara Pihak pada Ketentuan Trade Preferential System among the members of Organization of the Islamic Cooperation (TPS-OIC) yang di dalam Ketentuan Rules of Origin-nya mengatur tentang ketentuan LCV 30% untuk LDCs; b. Posisi Indonesia, seperti yang telah disepakati pada rapat-rapat sebelumnya adalah keberatan dengan permintaan tersebut, karena Indonesia telah memberikan komitmen Regional Content Value (RCV) 40% kepada Negara LDCs di ASEAN dan Indonesia hingga saat ini belum menjadi Negara Pihak TPS-OIC; c. Negara anggota D-8 akhirnya sepakat agar Bangladesh terlebih dahulu meratifikasi PTA D-8 dan kemudian mengangkat kembali isu ini setelah PTA 	
--	--	--	--	---	--

				<p>diimplementasikan;</p> <p>d. Bagi Indonesia, posisi ini sebenarnya sulit, karena Indonesia telah menandatangani Ketentuan Rules of Origin TPS-OIC pada 6 September 2011. Indonesia bahkan berencana untuk meratifikasi ketentuan TPS-OIC yang akan segera diimplementasikan setelah 4 negara menyerahkan transposed concession list HS 2012 ke Sekretariat OKI. Sebagai informasi, status TPS-OIC saat ini adalah telah ditandatangani oleh 17 negara dan 6 Negara Pihak telah memberikan transposed concession list. Sesuai pertemuan COMCEC ke-31 tahun 2015, TPS-OIC akan entry into force tanggal 1 Maret 2016, namun karena baru 6 Negara Pihak—sementara sesuai ketentuan dibutuhkan 10 Negara Pihak—yang menyerahkan transposed concession list, maka implementasinya ditunda;</p> <p>e. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Indonesia hanya memiliki dua opsi yaitu apakah akan menerima atau menolak ketentuan ini. Untuk opsi menolak akan sulit, karena Special and Differential (S&D) Treatment untuk LDCs merupakan hak LDCs yang diatur pada ketentuan WTO dan tidak dapat digugat. Oleh karena itu, Direktur PAOI memberikan rekomendasi agar K/L terkait (Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian) dapat mencari solusi atau instrumen/perangkat lain yang dapat mengakomodir ketentuan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>tersebut tanpa berbenturan dengan kepentingan nasional. Guna mendapatkan hasil ini, maka K/L terkait perlu membuat kajian tentang dampak pemberian LCV 30% bagi LDCs dan instrumen/perangkat antisipasi yang dapat dilakukan untuk mengakomodir ketentuan tersebut dengan tetap melindungi kepentingan industri nasional.</p> <p>6. Pada pembahasan draft DSM PTA D-8, rapat membahas hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pertemuan Special Session PTA D-8 sepakat untuk membuat Annex on DSM melalui protokol tanpa mengamandemen teks asli PTA, guna menghindari kebutuhan untuk meratifikasi PTA melalui persetujuan parlemen. Indonesia mengusulkan agar Annex on DSM mencantumkan pasal tentang conflict of provision clause yang mengatur inkonsistensi antara teks PTA dan Annex, sehingga secara tidak langsung mengamandemen PTA; b. Pada pembahasan teks Annex on DSM, rapat sepakat agar Annex hanya ditandatangani Contracting Parties PTA tanpa menyebutkan nama negara; c. Rapat juga sepakat agar Annex hanya mengacu pada Pasal 26 PTA dan tidak mencantumkan Pasal 25 PTA; <p>Rapat membahas secara umum penjelasan pasal-pasal dalam draft awal yang dikonsep oleh Kemlu dan sepakat untuk menyampaikan masukan tertulis untuk disampaikan kemudian dalam waktu satu minggu setelah</p>	
--	--	--	--	---	--

				pembahasan rapat.	
7.	16-18 Juni 2016, Makassar, Sulawesi Selatan	Koordinasi Kerjasama Regional	Biro KLN	<p>1. Untuk forum kerjasama BIMP-EAGA, Propinsi Sulawesi Selatan tahun ini akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan <i>The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Business Matching</i>, yaitu di <i>Four Point-Sheraton Hotel Makassar</i> pada tanggal 14-16 Oktober 2016. Kabag Kerjasama Luar Negeri menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sudah melakukan persiapan matang, untuk kegiatan dimaksud.</p> <p>2. Pada kerjasama ASEAN dibawah AMAF, terdapat kerjasama dengan PISAgro (<i>Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture</i>). Adapun komoditas yang dikembangkan adalah kakao yang berada di Kabupaten Bone dan Soppeng. Bentuk kerjasamanya seperti mengembangkan sekolah lapang petani dan untuk melatih petani pada <i>Good Agricultural Practices (GAP)</i>, termasuk pengaplikasian yang aman dari pestisida dan pupuk, dan produksi kompos. Hal ini juga memberikan pelatihan tentang teknik pemuliaan tanaman dan pasca panen yang meliputi fasilitasi fermentasi. Kelompok ini telah membentuk 284 sekolah lapangan. Pelatihan kepada 10.411 petani yang bekerja pada 9.107 ha lahan (termasuk daerah Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat), sehingga mampu meningkatkan produktivitas sebesar 45%. Ini sesuai dengan rencana awalnya, yaitu pada tahun 2020 dapat meningkatkan produktivitas hasil sampai 75%, dan untuk meningkatkan pendapatan sampai 75% bagi 160.000 petani.</p> <p>Pihak PISAgro dalam hal ini Nestlé Indonesia dan Cargill selaku mitra petani, selalu</p>	<p>1. Biro KLN perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan seluruh SKPD lingkup pertanian yang berada di seluruh wilayah BIMP-EAGA dan IMT-GT terkait persiapan mereka dalam berpartisipasi dalam <i>The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo, Conference and Business Matching</i>.</p> <p>2. Terkait kerjasama dengan PISAgro dibawah AMAF, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi ke kelompok-kelompok tani yang berada dibawah kemitraan Nestlé Indonesia dan Cargill selaku mitra petani, sehingga dapat diidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi petani kakao.</p> <p>3. Biro KLN, Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Luar Negeri serta BBPP Batang Kaluku dalam persiapan pelaksanaan pelatihan KSST tahun 2017 di Makassar, Sulawesi Selatan.</p>

				<p>melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pertanian TP dan Hortikultura serta Dinas Perkebunan Prop. Sulawesi Selatan terhadap program yang telah dan akan dilaksanakan.</p> <p>3. Untuk Kerjasama Selatan-Selatan Tringular (KSST) kami melakukan kunjungan ke BBPP Batang Kaluku di Kabupaten Gowa untuk berkoordinasi terkait persiapan pelatihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Jajaran BBPP Batangkaluku menyambut baik pelatihan yang akan dilaksanakan tersebut dan siap membantu kelancaran dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pertanian.</p>	
8.	27-29 Juni 2016, BPTP Banten	Koordinasi Kerjasama ASEAN di dalam negeri	NON BPTP Banten	<p>1. Pertemuan diterima oleh Kepala BPTP Banten, Bapak Muhamad Yusron, didampingi oleh Kepala Sub Bagian TU, Bpk. Ano Wirantono. Disampaikan bahwa tujuan koordinasi ini untuk menginformasikan kerjasama sub bagian Non ASEAN yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh BPTP Banten.</p> <p>2. Salah satu kerjasama Non ASEAN yang dijelaskan adalah skema Project Cycle Management (PCM) COMCEC. Skema pembiayaan proyek melalui bantuan hibah dari COMCEC OKI ini bersifat reimbursement. Diinformasikan bahwa project call untuk ke-4 kalinya akan dilaksanakan secara online pada bulan September 2016 mendatang. Kami mendukung agar BPTP Banten juga dapat aktif memanfaatkan skema kerjasama ini.</p> <p>3. Kemudian, diinformasikan pula mengenai durasi proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan di tahun 2017, hendaknya</p>	

				<p>melibatkan minimal 3 negara anggota OKI, durasi proyek 6-9 bulan dan dengan besaran maksimum pendanaan sebesar 250.000 USD (tuan rumah wajib menyediakan dana talangan 10% dan PCM COMCEC 90%). Perlu diketahui bahwa skema ini bersifat <i>reimbursement</i>.</p> <p>4. Beberapa tema bidang pertanian yang dapat diusung sebagai tema proposal, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ensuring sustainable water management</i> • <i>Improving business environment and policies in order to attract more agricultural FDIs</i> • <i>Enhancing institutional and human capacity for improving national agricultural statistics system</i> • <i>Facilitating small holders' access to finance</i> • <i>Improving legal and institutional framework in order to establish and strengthen farmer organizations</i> • <i>Promoting the utilization of modern agricultural techniques</i> • <i>Developing financial models for promoting agricultural value chains</i> • <i>Promoting access to international markets</i> • <i>Facilitating Smallholder Farmers' Market Access in the OIC Member Countries</i> • <i>Improving Institutional Capacity: Strengthening Farmer Organizations in the OIC Member Countries: Improving research and extension services of the farmer organizations</i> • <i>Promoting Agricultural Value Chains in the OIC Member Countries</i> • <i>Reducing On-Farm Food Losses in the OIC</i> 	
--	--	--	--	--	--

				<p><i>Member Countries</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Preventing Post-harvest Losses in the OIC Member Countries</i> <p>5. Pihak BPTP Banten menyambut baik informasi ini, dan menghargai inisiatif Biro KLN untuk menginformasikan kerjasama ini, untuk mengantisipasi waktu pengusulan kegiatan dan persiapan administrasi lainnya. BPTP Banten berharap dapat memanfaatkan skema ini, namun menunggu arahan dari unit Eselon II terkait lingkup Badan Litbang Pertanian.</p>	
BAGIAN MULTILATERAL					
1.	1-3 Juni 2016 Xi'an, RRT	G20 Agriculture Deputies Meeting, G20 Agriculture Ministers Meeting	Staf Ahli Menteri Pertanian, Staf Khusus Menteri Pertanian, Kepala Bidang Bilateral, Balingtan dan Negara Anggota G20	Kesepakatan bersama para Menteri Pertanian yang tertuang dalam Komunike G20	Akan diadakan kegiatan yang sama pada tahun depan dibawah Presidensi Jerman dan Monitoring Komitmen G20
2.	7 Juni 2016/ Badan Karantina Pertanian	Rapat Koordinasi SPS dalam rangka Persiapan Sidang Komite SPS ke-66 tanggal 30 Juni – 1 Juli 2016 di Jenewa, Swiss	Kementerian Perdagangan (Direktorat Perundingan Multilateral, Ditjen KPI dan Direktorat Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pusat Karantina Ikan dan Keamanan Hayati Ikan, Badan Karantina Ikan), Kementerian Pertanian (Biro Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Perkebunan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan, Pusat	<p>1. Indonesia-China Indonesia ingin meminta informasi dan klarifikasi dari pihak AQSIQ terkait kebijakan baru RRT yang mengharuskan setiap pengeksport ikan (hias dan konsumsi) ke China harus yang telah terdaftar/terregistrasi dan kebijakan yang mengharuskan produk makanan yang di ekspor ke RRT harus disertakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang Negara pengeksport, dimana peraturan yang diajukan masih dalam bentuk bahasa mandarin.</p> <p>2. Indonesia-Korea Selatan Indonesia ingin meminta informasi dan</p>	Merencanakan untuk melakukan pertemuan bilateral di sela-sela sidang Komite SPS-WTO ke-66 antara Indonesia dengan Korea Selatan, China, Mexico dan Amerika Serikat

			Karantina Hewan dan Pusat Karantina Tumbuhan).	klarifikasi dari Korea Selatan terkait kebijakan baru dari Korea Selatan terkait kandungan pestisida yang diinginkan di dalam produk makanan yang akan diekspor ke Korea Selatan dengan jumlah maksimum standar 0.01 mg/kg	
3.	9-10 Juni 2016 Hotel Novotel, Bogor	Rapat Koordinasi Tim Perizinan Ormas Asing	Kemlu, Kemdagri, BIN, BAIS, Baintelkam, KLHK, Kemdagri, Kemsos	Direktorat Sosbud OINB Kemlu akan mengundang pihak IDH dan unit terkait di Kemtan untuk membahas tindak lanjut peninjauan kerja sama antara IDH dengan Kemtan	Biro KLN akan berkoordinasi dengan Ditjen Perkebunan terkait Rencana Operasional Kerja IDH
4.	10 Juni 2016/ Kementerian LHK, Jakarta	Rapat Pembahasan Keanggotaan Indonesia pada CGIAR <i>System Council</i>	KLHK, Kemtan, KKP, Setneg dan Kemlu	<ol style="list-style-type: none"> Keanggotaan Indonesia dalam CGIAR perlu mempertimbangkan <i>cost and benefit</i> Legal aspect kerjasama dengan CGIAR dan lembaga riset dibawahnya seperti CIFOR, IRRI dan CIMMIT belum tuntas. Keanggotaan Indonesia di CGIAR belum ada dokumen legalnya. Perlu ditetapkan leading agency/focal point CGIAR di Indonesia sebagai instansi coordinator dalam penanganan kerjasama dengan CGIAR FORDA dalam sidang BOT mengusulkan agar <i>Hosting</i> CIFOR di Indonesia perlu dipertimbangkan untuk dihitung sebagai <i>in kind contribution</i> Indonesia. BOT CIFOR belum dapat memutuskan hal tersebut karena belum diatur. <p>Kontribusi/iuran Indonesia pada CIFOR perlu <i>earmarking</i> untuk kepentingan riset di Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Surat Sekjen LHK kepada Sekjen Kemtan untuk meminta Kemtan menjadi penjuror/<i>focal point</i> CGIAR PELH Kemlu akan mempertimbangkan untuk menjadi penjuror sementara bagi CGIAR, sampai ada keputusan dari kementerian teknis yang akan menjadi penjuror Setelah ditetapkan penjuror CGIAR dari Kementerian teknis maka segera diproses legal aspect keanggotaan CGIAR
5.	10 Juni 2016 BB Biogen, Bogor	Rapat Peran Penting dan Perkembangan Indikasi Geografis	Direktorat PPIH, Kementerian Luar Negeri,	<ol style="list-style-type: none"> Saat ini produk-produk yang sudah terdaftar IG di Kementerian Hukum dan HAM terdiri 38 produk 	Perlu adanya suatu Tim/Kelompok Kerja khusus yang menangani

		Produk Pertanian Indonesia	Kementerian Pertanian (Biro Perencanaan, Sesditjen Hortikultura, Sesditjen Peternakan, Sesditjen Tanaman Pangan, Sesditjen Perkebunan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan)	<p>yang terdiri dari 33 produk pertanian, 1 produk kehutanan, 2 produk perikanan/kelautan, 1 produk peternakan dan 1 produk kerajinan</p> <p>2. Indikasi Geografis memiliki peranan penting dan keuntungan bagi produk Indonesia khususnya produk pertanian Indonesia antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. untuk melindungi nama produk terkenal dari penyalahgunaan dan pemalsuan. ii. untuk mendorong pengembangan wilayah – pedesaan. iii. membantu konsumen dengan memberi mereka informasi tentang karakteristik spesifik dari produk. iv. Kebanggaan Daerah/wilayah bahkan Negara. v. Meningkatkan daya saing produk. vi. Meningkatkan nilai produk dan pendapatan masyarakat yang terkait dengan produk IG yang bersangkutan. vii. Melestarikan lingkungan dan budaya setempat yang terkait dengan kekhasan produk. <p>Mendorong pengembangan wilayah, dengan berkembangnya usaha agribisnis dan usaha-usaha terkait lainnya.</p>	secara intens IG Pertanian, karena permasalahan IG tidak hanya menyangkut aspek teknis penentuan komoditi, penyiapan persyaratan dan pendaftaran ke Kemen Kumham tetapi juga terkait dengan peningkatan nilai tambah, daya saing, promosi, pemasaran, pengawasan, sanksi hukum dan hubungan Internasional.
6.	15-16 Juni 2016 Novotel Golf and Resort, Bogor, Jawa Barat	Workshop dan Penyusunan Road Map for Action Packages Global Health Security Agenda	Kasubdit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Bagian Perencanaan Ditjen PKH, Badan Karantina Pertanian,	1. GHSA dikoordinasikan oleh <i>Steering Group</i> (SG) yang terdiri dari 10 Negara yaitu Kanada, Chili, Finlandia, Indonesia, India, Italia, Kenya, Saudi Arabia, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Adapun WHO, FAO, OIE dan organisasi internasional menjadi penasihat dari SG. Pada pertemuan di Helsinki, Finlandia pada tahun 2014, Negara anggota GHSA telah mengidentifikasi 11 <i>action packages</i> , yang kemudian didiskusikan lebih rinci pada	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan akan menyampaikan 10 <i>Roadmap For Action Packages Global Health Security Agenda</i> (GHSA) hasil workshop ke Kementerian Kesehatan selaku <i>focal point</i> GHSA.

			Badan Litbang Pertanian, Seditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Seditjen Kementerian Kesehatan.	<p>pertemuan GHSA di Jakarta dan difinalisasi di Washington DC pada akhir tahun 2014. Setiap negara dapat berpartisipasi dalam 1 (satu) atau lebih paket aksi GHSA ini. Dalam pengembangan paket aksi untuk mencapai target GHSA, perlu diperhatikan bagaimana menterjemahkan dukungan politik menjadi aksi. Setiap paket aksi harus memiliki target untuk 5 (lima) tahun, indicator untuk mengukur kemajuan, daftar penilaian awal, aktifitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan.</p> <p>2. Untuk mendukung keberhasilan GHSA kita harus berperan aktif, terlebih pada tahun 2016 ini Indonesia diberi kesempatan dan kepercayaan untuk berperan sebagai ketua <i>Global Health Security Agenda (GHSA) Steering Group</i> dan <i>the Zoonotic Disease Action Package (ZDAP)</i>.</p> <p>3. Pada saat ini, Indonesia aktif dalam 4 (empat) paket aksi yaitu <i>zoonosis, antimicrobial resistance, Surveillance dan Linking Public Health with Law and multisectoral Response</i>. Adapun untuk paket aksi lain walau secara formal tidak menyatakan ikut namun tetap memerlukan adanya roadmap untuk 5 (lima) tahun yaitu paket aksi <i>biosafety and biosecurity, laboratory system, reporting, workforce development, emergency operation centre, dan medical countermeasure and personnel deployment</i>.</p> <p>4. <i>10 Roadmap For Action Packages Global Health Security Agenda (GHSA)</i></p>	
7.	16-18 Juni 2016 Bali	Koordinasi Kerjasama OIP	Dinas Perkebunan Propinsii Bali	Teridentifikasi dan terevaluasinya produk-produk Indikasi Geografis (IG) di Propinsi Bali yaitu Kopi Arabika Kintamani Bali dan Mete Kubu Bali	1. Perlu kiranya dilakukan peningkatan kualitas produk agar memenuhi persyaratan

					<p>pasar</p> <p>2. Perlu dilakukan promosi untuk menjaga keberlanjutan pasar yang telah berkembang di luar negeri.</p>
8.	16-18 Juni 2016 Sulawesi Selatan	Koordinasi Tindak Lanjut Kerja Sama dengan lembaga CIMMYT	Balai Penelitian Tanaman Serealia – Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	Telah disusun <i>draft Host Country Agreement</i> (HCA) oleh Badan Litbang. Dalam perkembangannya <i>draft</i> HCA tersebut mendapatkan masukan dari Kemenlu, selanjutnya Kementan melalui Badan Litbang Pertanian telah mengupayakan untuk merevisi <i>draft</i> HCA sesuai masukan dari Kemenlu. Selanjutnya <i>draft</i> HCA CIMMYT ini telah disampaikan kembali ke Kemenlu melalui Biro KLN Kementan pada bulan Juli 2015 namun sampai sekarang belum ada tanggapan dari pihak Kementerian Luar Negeri	Biro KLN Kementan akan berupaya untuk merespon dan menindaklanjuti HCA tersebut serta perpanjangan MSP yang telah berakhir tahun 2015 dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik internal (berkoordinasi dengan Badan Litbang Pertanian) maupun koordinasi dengan interkem seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara.
9.	20-22 Juni 2016 Malang	Koordinasi Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Lembaga Penelitian CIP	Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (Balitkabi), Kendal Payak, Malang, Jawa Timur	<p>1. Kerjasama penelitian antara Badan Litbang Pertanian dan <i>International Potato Center</i> (CIP) telah dirintis sejak tahun 1980 hingga saat ini. MOU kerjasama telah beberapa kali diperpanjang secara periodik setiap 5 tahun. MOU yang terakhir ditandatangani tanggal 22 Mei 2013 dan berlaku sampai dengan 22 Mei 2017.</p> <p>2. Pada tanggal 31 Mei-3 Juni 2016 yang lalu, CIP dan Balitkabi menjadi host/tuan rumah <i>Asia Sweetpotato Breeders Meeting</i> di Malang dengan peserta dari Mozambique, China, Vietnam, PNG, India, Bangladesh, CIP Kampala Afrika, CIP-Peru, CIP Indonesia, Balitkabi, UNPAD, dan UNIPA.</p>	CIP akan terus aktif membantu pemulia lokal untuk bisa mengakses sumber daya genetik internasional sebagai bahan program pemuliaan nasional. Usaha yang dilakukan adalah dalam pemuliaan kentang dan ubi jalar bersama dengan BALITSA dan BALITKABI yang akan menghasilkan beberapa varietas rilis.
10.	22 Juni 2016/ Badan Litbang Pertanian	Rapat Kerjasama antara Balitbangtan dan CIAT	Biro KLN, BKP, BB Pascapanen, Balitkabi, CIAT, CIP dan CIRAD	Pemilihan lokasi proyek FoodStart ++ ditetapkan sama dengan lokasi Proyek SOLID yaitu di Propinsi Maluku dan Maluku Utara, karena wilayah	MOU CIAT dengan Badan Litbang hanya mengcover area prioritas penelitian, sedangkan untuk proyek

				tersebut cocok untuk jenis umbi-umbian	FoodStart++ sebaiknya dibuat MOU sendiri bekerja sama dengan SOLID yang berada di bawah BKP
11.	23 – 24 Juni 2016 MPIG Sumedang	Koordinasi WIPO	Biro KLN, MPIG Ubi Cilembu dan MPIG Tembakau	Pemetaan terhadap tantangan dan kendala terkait Indikasi Geografis dan monitoring aktivitas kegiatan MPIGG	Akan dilakukan Koordinasi IG ke seluruh lokasi MPIG di Indonesia
12.	29 Juni 2016 Hotel Akmani	Rapat Jaring Masukan WIPO	Kemlu, K/L terkait dan Perguruan Tinggi	Jaring masukan diperoleh dari seluruh instansi	Akan diadakan rapat lanjutan
13.	27-29 Juni 2016 Pontianak, Kalimantan Barat	Koordinasi Persiapan Calon Lokasi HPS ke-37 tahun 2017	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Biro Kerja Sama Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan Provinsi Kalimantan Barat menjadi lokasi pelaksanaan peringatan HPS ke-37 tahun 2017; 2. Potensi provinsi Kalimantan Barat: (1) perkembangan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan, serta hasil perkebunan terus meningkat; (2) Kekayaan keragaman hayati Plasma Nutfah yang mendukung berkembangnya keragaman pangan lokal dan Nasional; (3) Obyek wisata budaya dengan latar belakang sejarah dan aneka ragam seni dan budaya yang unik dan menarik; (4) Ketersediaan fasilitas penginapan/hotel dan sarana transportasi yang memadai untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan nasional; (5) letak provinsi Kalbar yang berbatasan dengan Negara Serawak Malaysia 3. Direncanakan yang akan menjadi lokasi pelaksanaan HPS adalah Rumah Radakng dan Rumah Melayu yang berada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 	Pembuatan Surat Menteri Pertanian perihal Penunjukan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Tuan rumah Peringatan HPS ke-37 Penyusunan Rencana anggaran di Provinsi Kalbar

BAGIAN PHLN DAN ATASE PERTANIAN

1.	9 – 10 Mei 2016 Balai Besar Biogen, Badan Litbang Pertanian, Kementan	Rapat Rekonsiliasi Kegiatan Proyek CF-SKR Tahun 2015	Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PSP, Badan BPPSDMP, Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Perlengkapan	<p>1. Terdapat selisih dana realisasi pencairan dana CF-SKR tahun 2015 antara data di Kementerian Keuangan dengan data di Kementerian Pertanian</p> <p>1. Penerima bantuan proyek CF-SKR tahun 2015, yaitu: Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan PPSDMP (tiga eselon 1) serta Biro KLN sebagai sekretariat CF-SKR.</p> <p>2. Setelah dilakukan penyamaan data bersama-sama dengan masing-masing unit eselon satu terkait, hasil data yang ada di Kementerian Pertanian sama dengan data yang ada di Kementerian Luar Negeri.</p>	Hasil rapat akan digunakan sebagai bahan rekonsiliasi di Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Kementan.
2.	18-20 Mei 2016, Nagoya Hill Batam	Workshshop Pengelolaan PHLN dengan Lembaga Donor	Satker Pengelola Proyek PHLN Lingkup Kementerian Pertanian dan Lembaga Donor	<p>1. Materi Pertama disampaikan oleh Sekretariat Negara dengan Judul “Peraturan dan Prosedur Penugasan Tenaga Asing Serta Pemanfaatan Peluang Kerja Sama Teknik Luar Negeri”. Adapun materi disampaikan menjelaskan peran posisi Sekretariat Negara sebagai pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Teknik Luar Negeri antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Kerja Sama Pembangunan, serta memberikan pertimbangan teknis dan administrasi dalam hal sinkronisasi dan harmonisasi dalam rangka kerja sama. Selain hal tersebut, peran penting Sekretariat Negara adalah pemberian Surat Persetujuan Penugasan Tenaga Ahli Asing, yang bersinggungan dengan pengelolaan PHLN dalam hal ini banyaknya Tenaga Ahli/Konsultan yang ditugaskan donor untuk memantau dan mengevaluasi proyek donor tersebut. Setelah penyampaian materi terjadi.</p> <p>2. Materi Kedua disampaikan oleh Direktorat Pinjaman dan Hibah, Ditjen Pembiayaan Pengelolaan dan Risiko Kementerian Keuangan dengan judul “Pengelolaan</p>	Satker Pengelola Proyek PHLN dapat mengelola proyek dengan baik dan tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

				<p>Pinjaman dan Hibah Luar Negeri”. Adapun materi ini disampaikan menjelaskan dasar hukum pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (Perencanaan, Negosiasi dan Penandatanganan, Penganggaran dan Pelaksanaan).</p> <p>3. Materi Ketiga disampaikan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Yang menyampaikan materi dengan Judul “Adminstrasi Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Materi ini menjelaskan mengenai penatausahaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Penatausahaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri meliputi administrasi pengelolaan dan akuntansi pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Dalam materi ini juga dijelaskan bahwa setiap Pinjaman dan Hibah Luar Negeri wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan dalam hal Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.</p> <p>4. Materi Keempat disampaikan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) Ditjen Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan. Yang menyampaikan materi dengan judul “Prosedur Penyelesaian Refund PHLN”. Proses Refund PHLN merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, namun demikian dikarenakan belum adanya ketentuan yang mengatur tentang Penyediaan dan Pengembalian Dana Sebagian Atau Seluruh Pinjaman dan Hibah Luar Negeri kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Hibah. Hal ini tentu sangat mendesak karena</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>pada pratiknya banyak proses refund yang dialami oleh penerima Hibah. Adapun faktor pendukungnya perlunya pengaturan refund PHLN dapat dilihat pada kasus-kasus yang telah terjadi</p> <p>5. Materi Kelima disampaikan oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian, yang berjudul "Pelaporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri". Dalam penyampaianya, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</p>	
3.	30-31 Mei 2016, Wisma Padepokan Volly Sentul City Bogor	Pembahasan Draft Revisi Pedoman Administrasi Keuangan (PAK)	Acara diikuti oleh Satker Lingkup Kemenkeu, dan dibuka oleh Pak Hartono mewakili Karo KP	Pembahasan revisi Draft Pedoman Administrasi Keuangan (PAK) yang akan mengganti Permentan 19/2013 yang diperbarui sesuai dengan perkembangan administrasi keuangan yang terbaru.	Draft PAK akan disempurnakan dengan mengundang kembali Satker-Satker Pengelola Keuangan.
4.	9 Juni 2016 Biro KLN Kementan	Rapat Pendahuluan Rekonfirmasi Penarikan T. A 2017 dan Proyeksi Maju Penarikan PHLN 2018-2021	Biro KLN, Biro Perencanaan, BPPSDMP, Badan Ketahanan Pangan, Ditjen PSP, Badan Litbang dan PMU/Pelaksana Proyek PHLN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyek SMARTD pada dasarnya tidak perubahan rencana penarikan untuk T.A 2017 serta belum ada rencana perubahan untuk tahun 2018 – 2021 2. Sedangkan untuk BKP, saat ini belum bisa menerima rencana hibah CF-SKR yang ditawarkan oleh Biro Kerjasama Luar Negeri. 3. Untuk proyek PHLN di PSP terdapat 2 proyek yang rencananya mengalami perubahan penarikan T.A 2017, proyek WISMP2 rencananya tidak diperpanjang dan FMSRB saat ini belum jelas kepastian proyeknya. <p>Untuk proyek PHLN di BPPSDMP yakni IPDMIP ada perubahan RMP 3.402.336 Milyar Rupiah sebagaimana surat BPPSDMP kepada Kepala Biro Perencanaan</p>	Hasil rapat akan digunakan sebagai bahan rencana perubahan penarikan untuk T.A 2017 di Kementerian Keuangan pada tanggal 14 Juni 2016
5.	14 Juni 2016,	Rapat Rekonfirmasi Perubahan	Kementerian Keuangan,	1. Proyek SMARTD pada dasarnya tidak	Terdapat perubahan penarikan

	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Penarikan T.A 2017 dan Rencana Maju Penarikan 2018-2021	Bappenas, Biro Kerjasama Luar Negeri, Biro Perencanaan dan Satket Pengelola Proyek Pinjaman dan Hibah Terencana	<p>perubahan rencana penarikan untuk T.A 2017 serta belum ada rencana perubahan untuk tahun 2018 – 2021.</p> <p>2. Terdapat perubahan penarikan PHLN di Hibah CF-SKR untuk T.A 2017 yang semula 1 Milyar menjadi 4,2 Milyar</p> <p>5. Untuk Proyek WISMP2 terdapat perubahan penarikan untuk T.A 2017 menjadi 0 Rupiah. Disebabkan PSP tidak melanjutkan perpanjangan dengan Bank Dunia</p> <p>6. Untuk Proyek IPDMIP di BPPSDM terdapat perubahan penarikan yang semula 152.59 Milyar menjadi 15,46 Milyar. Hal ini disebabkan karena proyek belum ada titik temu dengan dengan <i>executing agency</i> (Kementerian PUPERA)</p>	untuk T.A 2017
6.	17 Juni 2016 Hotel Aston Makasar	Pertemuan Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	lingkup Unit Eselon I Kementan, UPTD Kementan di Makasar, Dinas Pertanian Propinsi (Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur Sulawesi Tenggara Maluku Utara), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan maupun perwakilan Pemerintah Daerah (BBPP Batang Kaluku, BPTP Propinsi Sulawesi Selatan, STPP Gowa).	<p>1. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari lingkup Kementerian Pertanian, UPTD Kementerian Pertanian di Makasar, Dinas Pertanian Propinsi (Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur Sulawesi Tenggara Maluku Utara), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan maupun perwakilan Pemerintah Daerah (BBPP Batang Kaluku, BPTP Propinsi Sulawesi Selatan, STPP Gowa).</p> <p>2. Sebagai narasumber pada pertemuan adalah dari Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara dan dari Direktorat Konsuler, Kementerian Luar Negeri. Kedua narasumber tersebut menyampaikan masukan/tanggapan serta pemaparan terkait dengan prosedur</p>	Usulan perbaikan, baik teknis maupun redaksional akan segera diselesaikan untuk selanjutnya akan difinalisasi dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian

				<p>permohonan Surat Persetujuan (SP), permohonan Paspor Dinas, <i>exit-permit</i> dan rekomendasi visa.</p> <p>3. Beberapa point yang perlu menjadi perhatian dalam pengurusan administrasi PDLN, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu pengajuan dari unit Eselon I kepada Sekretariat Jenderal masih terlalu singkat; - Ketidak-sesuaian tugas dan fungsi calon yang diusulkan dengan materi pertemuan / sidang; <p>4. Saat ini, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri sedang merancang sistem online pengurusan PDLN yang akan diujicobakan terlebih dahulu sebelum disosialisasikan ke semua Kementerian / Lembaga.</p> <p>Diharapkan dengan diberlakukannya sistem online tersebut, akan lebih mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi PDLN untuk semua Kementerian / Lembaga.</p> <p>5. Mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas maka peserta mengusulkan proses pengusulan administrasi penugasan dinas bagi pejabat eselon III, IV dan staf dapat diusulkan melalui surat Sekretaris Badan / Sekretaris Ditjen / Sekretaris Itjen langsung kepada Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, terutama untuk penugasan Tugas Belajar, Workshop ataupun Pelatihan. Sedangkan untuk pengusulan penugasan Eselon I dan II tetap melalui surat Kepala Badan / Direktur Jenderal / Inspektorat Jenderal kepada Sekretaris Jenderal.</p>	
--	--	--	--	--	--

7.	21 Juni 2016 Bogor	Persiapan Penyusunan Aplikasi RKAKL-ADIK Tahun Anggaran 2016	Unit Eselon I Lingkup Kementan dan Unit Eselon II Lingkup Setjen.	<p>Pada pemaparan penyusunan Aplikasi RKAKL-ADIK TA 2016 oleh Kementerian Keuangan yang perlu diperhatikan ada 3 Level yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat K/L Input, Aktivitas, Output, Sub Outcome dan Outcome 2. Tingkat Unit Input, Aktivitas, Output, Outcome dan Program 3. Tingkat Kegiatan Aktivitas, Subouput dan output <p>Konskuensi Logis dan data harus konsiten Sub Ouput dan komponen menjadi standar penambahan program, kegiatan output, sub output dan komponen harus diikuti/didahului oleh penambahan ADIK.</p>	Akan diadakan Workshop Penyusunan RKAKL – ADIK Tahun 2016 di Hotel Sahira Bogor tanggal 22-23 Juni 2016, diminta setiap Eselon I Lingkup Kementan maupun Eselon II Lingkup Setjen mempersiapkan data-data yang diperlukan.
8.	22 Juni 2016 PPNMP Ciawi - Bogor	Menghadiri Sosialisasi Program Taspen dan BPJS bagi ASN	Unit Eselon I lingkup Kementan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paparan dari Penyelenggaraan Program Taspen Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara. PT. Tapan adalah BUMN yang merupakan lembaga keuangan dan bukan Bank yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan peningkatan kesejahteraan PNS melalui Asuransi dan Pensiun, Produk yang dihasilkan oleh PT. TASPEN adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Tunjangan Hari Tua - Program Pensiun - Program Jaminan Kecelakaan Kerja - Program Jaminan Kematian 2. Paparan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) adalah merupakan transpormasi dari Asuransi Kesehatan (ASKES). <ul style="list-style-type: none"> - Tarif biaya pelayanan kesehatan terus mengalami kenaikan 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Pergeseran pola penyakit dari infeksi ringan ke penyakit degeneratif kronis - Perkembangan teknologi kedokteran yang semakin maju - Pasien tidak mempunyai pilihan, memiliki posisi tawar yang lemah, mendapatkan informasi yang asimetris - Sakit berdampak sosial dan ekonomi. <p>Karena resiko individu sakit membayar sendiri dan tidak ada kepastian biaya sehingga menjadi beban ekonomi keluarga maka pemerintah memberikan asuransi sosial yang bersifat wajib dan berprinsip gotong royong dengan kepastian biaya membayar iuran setiap bulannya dan memperoleh manfaat yang lus dan berkelanjutan. Pemegang Kartu ASKES, JAMKESMAS, otomatis menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan dan kartunya tetap bisa digunakan.</p>	
9.	23 Juni 2016 Bogor	Rekonsiliasi data dan Informasi BMN	Unit Eselon I lingkup Kementan dan Eselon II Setjen	Rekonsiliasi data dan Informasi BMN adalah pengecekan pemasalahan yang dihadapi seperti tanah, rumah negara, kendaraan dinas dan laporan sistem informasi manajemen tanah pemerintah (SIMANTAP) yang berada di lingkungan Eselon I Lingkup Kementan.	Diharapkan dari masing – masing eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang masih mempunyai masalah dengan BMN terutama aset negara berupa tanah, bangunan dan kendaraan bermotor agar segera mengajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) terhadap hal – hal tersebut.
10.	Selasa, 23 Juni 2016, Hotel Savoy Homan, Bandung	Pertemuan Koordinasi Evaluasi PHLN Lingkup Kementerian Pertanian	Sesdit/Sesba dan/atau yang mewakili melakukan pemaparan atas kegiatan pengelolaan PHLN di masing-masing Satkernya. Serta pengelola proyek, Bappenas, Kementerian Keuangan.	1. Acara dibuka oleh Bapak Sekretaris Jenderal yang menyampaikan pemanfaatan dan pengelolaan PHLN di Kementerian Pertanian belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan beberapa faktor. Antara lain, pengelola proyek yang merupakan pejabat struktural umum, kemudian pengelola proyek tersebut masih melakukan kegiatan-kegiatan yang lain sehingga <i>focusing</i> pada program bantuan tersebut mengalami banyak hambatan.	Adapun tindak lanjut dari kegiatan evaluasi yang disarankan oleh Bapak Sekjen perlu adanya workshop/training khusus pengelolaan PHLN sehingga adanya keberlanjutan/regenerasi manajemen proyek, Workshop Administrasi Pengelolaan PHLN. Untuk tahun 2017 PHLN sedapat mungkin dikelola khusus dengan

				<p>Perbandingan dengan pengelolaan proyek pada tahun-tahun sebelumnya, nilai APBN Rupiah Murni masih sangat kecil sehingga pengelolaan proyek bantuan luar negeri pada saat itu dikelola dengan sangat baik. Badan Litbang Pertanian pada era tersebut banyak kegiatan yang dibiayai oleh bantuan pinjaman luar negeri yang diantaranya untuk peningkatan capacity building yaitu dalam penyelenggaraan program S2/S3. Begitupula dengan unit eselon 1 lainnya seperti Ditjen Peternakan yang juga memanfaatkan peluang bantuan luar negeri dengan bekerjasama dengan organisasi internasional seperti FAO dan lain-lain.</p> <p>2. Namun pada saat ini, setelah APBN Kementerian Pertanian meningkat menjadi 31,5 Triliun terjadi perubahan yang sangat drastis dari segi manajemen penanganan pemanfaatan bantuan luar negeri yang dirasakan seperti proyek sambilan. Sebagai solusi dari permasalahan ini, Para Sesdit/Sesba dihimbau untuk dapat menunjuk staf pada unit kerjanya untuk dijadikan pengelola proyek bantuan luar negeri yang jabatannya disetarakan dengan jabatan struktural yang diakui di tingkat lokal lingkup Kementerian Pertanian. Langkah ini bertujuan agar pengelolaan batuan tersebut dapat memfokuskan kinerjanya pada pengelolaan proyek bantuan luar negeri;</p>	<p>prasyarat dibekali fasilitas yang memadai. Setelah kegiatan evaluasi ini perlu adanya Workshop Perencanaan PHLN untuk tahun 2017 agar PHLN berjalan optimal dan yang terakhir Bapak Sekjen mengingatkan sedapat mungkin proyek yang berasal dari PHLN bersifat on-top.</p>
11.	28 Juni 2016 Bogor	Bimtek Verifikator Laporan Keuangan dan Koordinasi Persiapan Penyusunan LK Semester I TA. 2016 Tk. UAPPA-E1 Setjen	Unit Eselon I lingkup Kementan dan Eselon II Setjen	<p>1. Penyampaian materi mengenai verifikator Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Bp. Deni dari Ditjen APK Kemenkeu. Dalam penyampaiannya bahwa yang masuk ke dalam aset ada 2 (dua) jenis yaitu aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap berupa antara lain tanah, gedung sedangkan aset tidak tetap</p>	

				<p>dapat berupa laptop yang sudah rusak contohnya. Sedangkan di laporan Keuangan mulai tahun 2015 dalam bentuk akrual terdapat laporan realisasi anggaran, laporan operasional serta di akrual terdapat tindakan penyusutan nilai aset.</p> <p>2. Pada laporan terdapat neraca aset dan ada kejadian muncul persediaan yang belum teregister ini harus dicek ulang data persediaan yang di input. Untuk penyusunan laporan keuangan semester I masih diperbolehkan tetapi untuk laporan semester II/Tahunan tidak boleh muncul belum teregister. Ini berlaku juga pada SIMAK BMN. Adapun hubungan pembelian persediaan dengan penyajian di neraca antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Beli persediaan untuk konsumsi masuk neraca persediaan dan dipakai akan masuk di beban persediaan; Beli persediaan untuk pemeliharaan masuk neraca beban pemeliharaan; Beban persediaan untuk diserahkan ke masyarakat masuk neraca yang pemakaiannya beban barang diserahkan ke masyarakat; Beli persediaan untuk bantuan sosial masuk neraca persediaan dengan beban bantuan sosial. <p>Aplikasi persediaan membedakan berdasarkan kode barang yaitu 1.22.33. 44.55 xxx sesuai PMK 59 tabel 2 masa manfaat contohnya partisi ruangan tidak menambah manfaat/kapasitas, kemampuan, tambah umur dengan spesifikasi yang sama.</p> <p>3. Akun kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan Akun uang muka dari KPPN. Akun bisa dijurnal sehingga tidak ada/muncul</p>	
--	--	--	--	---	--

				perbedaan.	
12.	1-30 Juni 2016 Biro KLN Kementan	Penugasan Pejabat/Pegawai Kementan ke luar negeri	Sekneg, Kemenlu, Kedutaan Besar mitra, Eselon I terkait lingkup Kementan	Telah diproses penugasan pejabat/pegawai Kementan ke luar negeri sebanyak 72 orang yaitu mengikuti Workshop/seminar sebanyak 10 orang, menghadiri pertemuan/sidang sebanyak 22 orang, melakukan kunjungan kerja sebanyak 22 orang, mengikuti training sebanyak 6 orang, program S2 sebanyak 6 orang, program S3 sebanyak 6 orang.	Berkas/dokumen perjalanan pejabat/pegawai ybs telah dikirim ke Sekretariat Negara RI untuk memperoleh Surat Persetujuan Segneg RI dan Kemenlu untuk memperoleh exit permit serta Kedutaan Besar Negara Mitra untuk memperoleh visa.
ATASE PERTANIAN ROMA					
1.	3 Mei 2016 Roma	Pertemuan Bapak Dubes dengan Piombino Port Authority.	Bapak Dubes, DR. Luciano Guerrieri, Stefano Bianco, Marcello Maio, Atase Pertanian	<p>Pertemuan Bapak Duta Besar, August Parengkuan, dengan Presiden Piombino Port Authority, DR. Luciano Guerrieri, Safety, Security, Logistics and Dvelopment Manager, Mr. Stefano Bianco, serta Site Manager SECA SpA merupakan tindak lanjut kunjungan atase pertanian dan atase perdagangan pada tanggal 19 April 2016 ke Piombino Port dalam rangka menjajaki rencana menjadikan Piombino Poert sebagai pintu masuk importasi minyak sawit Indonesia ke Italy dan negara sekitarnya.</p> <p>Kunjungan Presiden Piombino Port ke Bapak Dubes dalam rangka mengundang Bapak Dubes untuk mengunjungi Piombino Port sekaligus menjelaskan beberapa peluang investasi Indonesia guna mendukung peningkatan importasi minyak sawit Indonesia ke Italia. Disampaikan pula bahwa Piombino Port dapat disandari oleh kapal besar sampai bobot 40.000 ton dengan kedalaman dermaga lebih dari 20 meter dengan area pembangunan tanki penampungan minyak sawit seluas 9.000 – 10.000 m2.</p> <p>Selanjutnya DR. Luciano mengundang secara resmi</p>	<p>Melihat peluang dan peningkatan kebutuhan Itali akan minyak sawit sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan bahan pangan maka dipandang perlu untuk melakukan studi lebih lanjut terhadap kemungkinan pembangunan Piombino Port sebagai pintu masuk minyak sawit Indonesia ke Itali dan negara sekitarnya.</p> <p>Hal ini sesuai dengan hasil kunjungan kerja Bapak Bayu Krisnamurti dan Bapak Rusman Heriawan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan untuk mencari pelabuhan alternative pintuk masuk minyak sawit Indonesia ke Eripa selain pelabuhan Rotterdam, Belanda.</p>

				Bapak Dubes untuk berkunjung ke Piombino Port untuk bertemu dengan pejabat dan senator yang berasal dari daerah Pombino dan direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2016.	
2.	11 Mei 2016 Roma	Pertemuan Nobel Peace Laureates Alliance for Food Security and Peace	Bapak duta Besar RI, Dirjen FAO, DR. Graciano da Silva, Peraih Nobel Perdamaian: Muhammad Yunus (Bangladesh), Oscar Arias Sanchez (Costa Rica), Tawakkol Karman (Yemen), Betty Williams (Irlandia), dan Atase Pertanian.	<p>Pertemuan dilaksanakan di Sheikh Zayed Center dipimpin oleh Dirjen FAO, DR. Graciano da Silva bertujuan untuk mendengar dan bertukar informasi terkait perdamaian dan ketahanan pangan serta sebaliknya. Dalam sambutannya Dirjen FAO menyampaikan bahwa perdamaian membantu pencapaian ketahanan pangan tetapi itu tidak cukup karena kelaparan dan kerawanan pangan juga akan mempengaruhi perdamaian.</p> <p>Dirjen FAO mengajak para peraih nobel perdamaian Muhammad Yunus (Bangladesh, 2006), Oscar Arias Sanchez (Costa Rica, 1987), Tawakkol Karman (Yemen, 2011), dan Betty Williams (Irlandia, 1976) untuk bekerja bersama-sama guna meyakinkan bahwa kelaparan tidak akan memicu konflik yang berkelanjutan dan jika konflik terjadi, system distribusi pangan yang ada akan lebih tahan dan mempunyai kemampuan bertahan. Dalam kesempatan tersebut Dirjen FAO juga menyampaikan bahwa FAO ingin bekerja bersama seluruh stakeholders terkait untuk menangani multiple dan tantangan terkait ketahanan pangan dunia.</p>	
3.	16-17 Mei 2016 Montova	Seminar Peluang dan Investasi Perdagangan di Indonesia	Bapak Duta Besar, Wakil Presiden Confindustria Mantova, Mr. Maurizio Migliarotti, Wakil dari SEASIA (<i>South East Asia Business Partner</i>), Wakil dari SACE (<i>The Italian Export Credit Agency</i>), Wakil dari Simest Spa dan Wakil dari Bank Intesa San	1. Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku usaha Italia khususnya kota Mantova tentang peluang Bisnis dan investasi Indonesia, pada tanggal 17 Mei 2016 bertempat di Kantor Kadin Mantova, KBRI Roma bekerjasama dengan Confindustria Mantova telah menyelenggarakan seminar berjudul " <i>Indonesia: Un Mercato Interessante Per Le Imprese Italiane</i> " atau Indonesia sebuah pasar yang menarik bagi perusahaan	Seminar peluang usaha dan investasi Indonesia di Mantova mendapatkan sambutan yang baik tidak saja dari pelaku usaha tetapi juga dari kalangan pemerintah yaitu kantor Walikota.. Hal ini menunjukkan minat pelaku usaha untuk mendapatkan informasi peluang usaha dan investasi di Indonesia cukup besar sehingga

			Paolo, Atase Perdagangan dan Atase Pertanian.	<p>Italia.</p> <p>2. Seminar yang dibuka secara bersama oleh Duta Besar KBRI Roma dan Wakil Presiden Confindustria Mantova, Mr. Maurizio Migliarotti dihadiri oleh 28 pengusaha Italia yang tergabung dalam Confindustria Mantova. Sementara dari KBRI Roma hadir juga Atase Perdagangan, Atase Pertanian, Sekretaris II Ekonomi.</p> <p>3. Mr. Maurizio Migliarotti menyampaikan seminar ini akan menjelaskan peluang usaha dan investasi di Indonesia sehingga disarankan untuk dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha Mantova yang berniat mengembangkan usaha dan investasinya ke Indonesia yang saat ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dibandingkan beberapa negara lainnya.</p> <p>Duta Besar Indonesia KBRI Roma menjelaskan mengenai perkembangan perekonomian Indonesia terkini. Dijelaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh walaupun saat ini perekonomian global mengalami krisis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 sebesar 4,7% dan pada kuartal pertama tahun 2016 tumbuh sebesar 4,92%. Pertumbuhan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling energik di Asia. Bank Dunia pun telah memberikan perkiraan bahwa pada tahun 2030, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke 10 di dunia. Indonesia menjadi sangat menarik karena memiliki potensi pasar besar yaitu dengan jumlah populasi sebesar 240 juta jiwa dan memiliki banyak tenaga kerja generasi muda sebagai motor penggerak perekonomian Indonesia. Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia juga menarik untuk dijadikan sebagai basis</p>	<p>kegiatan seperti ini perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan frekuensinya di kota lainnya di Italia.</p> <p>Kementerian Pertanian dalam hal ini Biro KLN selanjutnya dapat mengagendakan dan mengalokasikan anggaran seminar yang sama dengan fokus pada produk-produk pertanian bekerjasama dengan asosiasi yang potensial untuk melakukan eksportasi produknya ke Italia di beberapa kota di Italia seperti Genova, Bologna, dan Milan serta beberapa Negara yang cukup tinggi akan kebutuhan produk-produk alsintan, kopi, coklat, minyak sawit seperti Tunisi dan Aljazair.</p>
--	--	--	---	---	---

				produksi untuk memenuhi pasar ASEAN yang memiliki populasi 600 juta jiwa. Hal penting lain yang perlu dipertimbangkan oleh pengusaha Mantova untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi adalah kondisi politik yang stabil dan sistem hukum Indonesia yang dapat memberikan jaminan bagi para investor Italia menanamkan modalnya di Indonesia.	
4.	19 Mei 2016 Roma	Video Conference SVLK	Bapak Duta Besar RI, August Parengkuan, Duta Besar RI DI Brussel, Yuri O Thamrin, Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kemen LHK, Bapak Ida Bagus Putera Parthama, Atase Perdagangan, Atase Pertanian KBRI Roma,	<p>Sebagai tidak lanjut kegiatan <i>roadshow</i> untuk promosi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10-19 Mei 2016 di Inggris, Jerman, Belanda dan Belgia.</p> <p><i>Video conference</i> dilaksanakan guna memberikan <i>up date</i> informasi terkait SVLK bagi perwakilan di negara-negara anggota EU yang belum dikunjungi pada <i>road show</i> di atas dengan moderator Bapak Dubes Yuri O Thamrin.</p> <p>SVLK merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia .</p> <p>Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia</p> <p>Sistem verifikasi legalitas kayu diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Unit manajemen hutan tidak khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya.</p>	Metode video conference yang telah dilaksanakan dalam mempromosikan SVLK dapat menjadi contoh bagi promosi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi Negara Uni Eropa, didahului dengan <i>roadshow</i> di beberapa Negara seperti Perancis dan Jerman setelah itu dilakukan video conference kepada seluruh perwakilan RI di Negara-negara Uni Eropa, peserta video conference tidak hanya para pejabat terkait di kantor perwakilan namun perlu ditambahkan dengan pengusaha, asosiasi, kamar dagang serta pejabat terkait dari masing-masing negara lokasi kantor perwakilan.

				Industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri.	
5.	23 Mei 2016 Roma	Rapat internal persiapan Resepsi Diplomatik tahun 2016 Asia Grup Meeting, FAO	Bapak DCM, Fungsi Pensosbud, Atase Perdagangan dan Atase Pertanian.	<p>Dalam rangka persiapan pelaksanaan Resepsi Diplomatic tahun 2016 dibahas beberapa kegiatan yang akan ditampilkan pada saat resepsi diplomatic serta rencana anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.</p> <p>Beberepa point yang disetujui pada rapat tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> memanfaatkan mahasiswa Indonesia yang ada di Italia dan mahasiswa Italia yang mendapat bea siswa Darma Siswa untuk menampilkan tarian atau budaya Indonesia; membuka stand pameran produk-produk unggulan Indonesia pada lokasi resepsi; menawarkan kepada beberapa pengusaha Indonesia yang berminat mempromosikan produknya dan dikemas dalam bentuk pagelaran budaya dan fashion show; diharapkan masing-masing atase teknis KBRI Roma dapat memberikan sharing anggaran mengingat anggaran resepsi diplomatic tahun ini sangat rendah sebesar 36.895 euro sementara anggaran resdip tahun 2015 sebesar 43.400 euro. 	<p>Terkait sharing anggaran dari atase teknis, termasuk atase pertanian, melihat anggaran Atani tahun 2016 sebesar 1.3 milyar rupiah dimana tidak terdapat anggaran untuk bantuan pelaksanaan resepsi diplomatic, kedepannya diharapkan Biro KLN dapat mengalokasikan anggaran untuk membantu pelaksanaan resepsi diplomatic, peringatan hari-hari besar nasional serta meningkatkan anggaran promosi atase pertanian.</p> <p>Selanjutnya untuk tahun ini atase pertanian akan mengalokasikan sisa anggaran promosi yang ada untuk membantu pelaksanaan resepsi diplomatic melalui pemasangan beberapa banner promosi produk pertanian untuk dipajang pada saat resepsi diplomatic.</p>
6.	27 Mei 2016 Milan	<i>Launching</i> Promosi Indonesia/Produk Pertanian di Jumbo Tram dan Bus	Bapak Duta Besar, Kepala ITPC Milan, Konsul Kehormatan RI di Milan, Masyarakat dan Diaspora Indonesia, Atase Perdagangan, dan Atase Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> Peresmian promosi Indonesia di kota Milan, Italy dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2016 oleh Bapak Duta Besar RI di Roma ditandai dengan melakukan pengguntingan pita di depan jumbo-tram, dihadiri oleh beberapa undangan swasta Italy, perusahaan periklanan, perusahaan konsultan, diaspora dan masyarakat Indonesia, atase perdagangan, atase pertanian dan Konsul 	<p>Selanjutnya ke depannya kejasama dengan kantor ITPC Milan dalam mempromosikan Indonesia khususnya produk pertanian akan terus ditingkatkan. Kementerian Pertanian melalui Biro KLN dapat memberi masukan kepada Atase Pertanian terkait gambar-gambar resolusi tinggi produk</p>

				<p>Kehormatan Indonesia di Milan, Mr. Jaccopo Fusaya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Promosi dilakukan pada satu unit jumbo-tram dengan tiga rangkain gerbong serta bus gandeng (gambar terlampir) dan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung dari Mei 2016 sampai dengan Oktober 2016 dengan pembiayaan dari anggaran promosi ITPC Milan tahun 2016 bekerjasama dengan KBRI Roma, atase perdagangan dan atase pertanian; 3. Dalam rangka promosi dan peningkatan volume ekspor komoditi unggulan dan pariwisata Indonesia promosi dengan memanfaatkan jumbo-tram dan bus dianggap cukup menjajikan dan efisien, jumbo-tram dan bus tersebut akan melintasi Duomo, kawasan bisnis Via Torino, Kantor Kamar Dagang Milan di Via Meravigli, Palazzo di Giustizia, Largo Augusto, Corso Porta Vittoria, Stasiun Kereta Porta Vittoria dan Corso Magenta, lokasi Gereja Santa Maria Della Grazie yang menjadi tuan rumah lukisan mural "The Last Supper" karya Leonardo da Vinci. Lokasi-lokasi yang dilintasi tersebut cukup banyak dikunjungi oleh turis manca negara dan masyarakat Italy; 4. Selanjutnya Bapak Duta Besar mengharapkan promosi semacam ini dapat dilakukan di beberapa kota besar di Italy termasuk Roma dan negara-negara yang merupakan wilayah akreditasi KBRI Roma seperti San Marino, Malta dan Siprus melalui kerjasama yang terpadu antara KBRI Roma, kantor ITPC Milan, Atase Perdagangan, dan Atase Pertanian melalui dukungan anggaran dari pusat; 	<p>pertanian yang akan dipromosikan di Italy seperti minyak sawit, coklat, kopi, buah-buah tropis, rempah-rempah termasuk alat mesin pertanian unggulan Indonesia.</p>
--	--	--	--	--	--

				5. Informasi lengkap terkait promosi Indonesia di kota Milan, Italy tersebut dapat diunduh pada 19 (sembilan belas) media online dan cetak seperti http://kom.ps/AfvRqe ; http://finance.detik.com/read/2016/05/30/114612/3220725/1036/begini-cara-ri-genjot-ekspor-kopi-ke-italia ; http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/778496-ini-cara-unik-mengiklankan-indonesia-di-kota-milan ; http://mdn.biz.id/n/236839/ ; antaranews.com; Bisnis.com.	
7.	30 Mei-3 Juni 2016 Roma	FAO Council ke-154	Dubes, August Parengkuan, Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementan, dengan unsur-unsur yang mewakili Kementan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemlu, dan KBRI Roma Kepala Pusat	Laporan lengkap akan disampaikan pada laporan bulan Juni 2016.	
ATASE PERTANIAN ROMA					
	1 Juni 2016	Rapat Internal KBRI dipimpin Dubes	Dubes, DCM, Fungsi-fungsi, Atase Teknis dan BPKRT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarahan Dubes untuk segera menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden (dokumen partnership yang telah disepakati) 2. DCM akan mengkoordinir untuk lebih memperjelas bentuk kerjasama tsb. 3. Dubes juga mengarahkan untuk lebih fokus pada kegiatan di IMAAM karena Ramadhan, kerjasama dengan kelompok Jewish dan African American, perlu di-aturl pertemuan dengan komunitas Yahudi 	Attani akan berkomunikasi dengan kantor pusat untuk mendapat informasi lebih lengkap program Strategic Partnership yang kearah pertanian.

	5 Juni 2016	Asia Fiesta 2016 di Washington DC	Korfung Pensosbus, Atdag dan Staf, Attani dan Staf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Street fair yang dimulai sejak tahun 2015, diikuti beberapa negara Asia, ie. Cina, Jepang, Indonesia, Thailand, Iran, India, Nepal, dll, dan dihadiri lebih dari 10.000 pengunjung dari pukul 10.00 – 19.00 2. KBRI menggandeng Indonesia American Association (IAA) untuk promosi pangan, batik, furniture, barang kerajinan di booth dengan logo Remarkable Indonesia 3. Kerjasama dengan Atdag, meja KBRI mendisplay kopi premium (Sumatera Coffee), teh premium (Arumtea, TehKu), coklat bar Wonder-Bali, kacang Garuda, permen Kopiko, biscuit Danish dll 4. Pelaku usaha/Diaspora Indonesia yaitu food truck Java Cove, Artha Rini's, food vendor Z-Kitchen, Liberty cookies, Indo Boutique (Batik), Woodwork by Parto & Joglo House (furniture), Dyah Ayu Griya dan DC fashionista (pakaian/ fashion) dapat menjual produk masing-masing karena sudah memiliki lisensi <p>Penampilan seni tari, penyanyi Shakila, dan demo masak martabak menjadi bagian dari promosi, dengan tambahan program kuis kepada para pengunjung untuk mengenalkan Indonesia</p>	Attani akan menggunakan cara <i>soft power diplomacy</i> melalui ajang ekshibisi ini sebagai salah satu cara promosi brand Indonesia untuk tahun mendatang Attani akan mengirimkan brafak KBRI terkait laporan kegiatan event ini
	5 Juni 2016	Pertemuan dengan American Jewish Committee (AJC) di Wisma	Komunitas Yahudi di AS, Dubes, Para Korfung dan Atase Teknis	Dubes menyampaikan bahwa perlu bekerjasama dalam meng-counter pandangan sebagian masyarakat yang masih negatif terhadap islam dan yahudi. Imam Yahudi dari Jerusalem menyam-paikan bahwa kerjasama harus terus di lakukan untuk memberikan pandangan bagi sebagian masyarakat tsb, dan sangat mengagumi mantan Presiden RI Gus Dur.	Attani akan menggunakan informasi hasil pertemuan untuk kepentingan RI
	7 Juni 2016	Pertemuan dengan Maryland Dept	Steve Connelly, Theresa A	Membahas potensi pertanian Maryland	Attani akan menindaklanjuti

		of Agriculture dan Mie Mie JS di KBRI	Borphy, Mie Mie Joe Strickler, Attani dan staf	(peternakan dan produknya) Dapat menjadi pintu untuk memperoleh contact di setiap state dept of agriculture karena berfungsi sebagai National Association of State Dept of Agriculture	komunikasi untuk tujuan kunjungan ke berbagai state dept of agriculture
	7 Juni 2016	Pertemuan internal dipimpin Dubes	Dubes, DCM, Fungsi Ekon, Pensos, Atase Teknis selain At Pertahanan	Arahan Dubes terkait brafak Kemlu untuk focus pada diplomasi ekonomi dengan hasil nyata, salah satu cara dgn ekshibisi (promosi produk pangan/pertanian dan non pangan di pasar AS Fungsi Ekonomi sebagai coordinator	Attani akan menindaklanjuti dengan memberikan daftar kegiatan promosi kerjasama dengan Atase Perdagangan
	9 Juni 2016	Pertemuan dengan Acha Production di pimpin Dubes	Dubes, DCM, Fungsi Ekon, Pensos, Atase Teknis selain At Pertahanan	1. Dubes akan menyiapkan surat referensi 2. Dubes akan bertemu Pimpinan County 3. Atdag akan menyiapkan untuk promosi kopi dibantu Attani yang juga akan menyiapkan display teh dan coklat Indonesia, Food Truck Indonesia tampil 4. Lomba foto Indonesia dan promosi Batik	Attani akan menindaklanjuti dengan penyiapn display teh premium Indonesia dan membeli coklat bar Monggo- Yogya dan Wonder-Bali
	13 Juni 2016	Rapat Persiapan Peringatan Hari Kemerdekaan RI di KBRI	DCM, Fungsi-Fungsi, Atase Teknis, BPKRT dan Pegawai Setempat	Disepakati bentuk kegiatan formal yaitu upacara bendera dan resepsi diplomatik Masyarakat akan dilibatkan berperan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menyertai peringatan HUT RI	Attani akan ikut berkontribusi untuk suksesnya kegiatan peringatan HUT RI ke-71 seperti tahun sebelumnya
	13 Juni 2016	Pertemuan penyusunan konsep brafak Diplomasi Ekonomi di KBRI	Fungsi Ekonomi, Fungsi Pensosbud, Atase Teknis selain At Pertahanan	Masing-masing mengumpulkan daftar kegiatan yang sudah berlangsung dari Januari – Mei terkait diplomasi ekonomi dengan tujuan dan hasil jelas/nyata dapat dalam bentuk angka/nilai Ekonomi akan melakukan kompilasi dan menyiapkan brafak	Attani kerjasama dengan Atdag menyiapkan daftar ekshibisi pangan/pertanian yang sudah diikuti s.d Mei dengan tampilan data hasil pelaksanaannya
	14 – 17 Juni 2016	World Tea Expo di Las Vegas	Attani, Kepala ITPC LA, Staf ITPC LA, Pelaku industri teh dan industri	1. Indonesia kembali berpartisipasi dalam World Tea Expo di Las Vegas dengan Paviliun Indonesia yang bertema Indonesia's	Attani akan bekerjasama dgn Atase Perdagangan dan ITPC LA mendukung partisipasi Indonesia

			tea/coffee cup.	<p>Remarkable Tea, Booth # 639.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaku usaha yang ikut adalah 3 perusahaan teh organik (PT Harendong Green Farm/Arumtea, PT Bukit Sari, TehKu, dan 2 perusahaan tea/coffee cup/paper packaging product (Glopac dan Impressionist Cup), Data transaksi yang dikumpulkan dan dikompilasi oleh ITPC LA smencetak nilai perkiraan USD 284,000 3. Teh Indonesia mendapat respon positif, antusias, dan kagum dari pengunjung yang hadir karena tampilan 2 jenis teh yang ada di dunia saat ini, <i>sinensis</i> dan <i>assamica</i>. 4. Konsistensi Indonesia tampil pada ekshibisi ini dapat dijadikan momentum untuk menggenjot ekspor teh Indonesia ke pasar AS. Semakin banyak pencinta teh AS yang mencari te premium seperti white tea karena memiliki aroma yang unik. <p>Para pelaku industri teh mengakui bahwa pelaksanaan tahun ini jauh lebih baik dari tahun 2015 karena peran ITPC LA dan dukungan Attani yang mewakili KBRI</p>	pada WTE 2017. Attani akan mengirimkan Brafak laporan kegiatan WTE 2016 melalui email maupun bersama dengan laporan triwulan II.
20 Juni 2016	Pertemuan dengan Mr. Russell Knight dari FAS di kantor USDA	Russell Knight ,Atase Pertanian dan Staf Pertanian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas rencana kunjungan Delegasi Indonesia (Lamongan dan Kementan) untuk melihat farm dan expo pertanian di AS sebagai studi banding 2. Membahas <i>tailor made proposal</i> Tim BSN, <i>Analyzing the Role of Standard Technical Regulation and Conformity Assessment Procedures in Food Supply Chain from Farm to Table</i> 	Attani akan menindaklanjuti komunikasi dengan Bupati Lamongan cc Dr A. Rachman (Kementan). Attani akan menindaklanjuti komunikasi dengan Ibu Konny, Kapus Kerjasama Standardisasi
21 Juni 2016	Pertemuan dengan Mr. Jeremiah Gracia, Economic Dev, City of Dublin di KBRI	Jeremiah Gracia dan Attani		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jeremiah menjelaskan potensi ekonomi kota Dublin 	Attani akan menindaklanjuti komunikasi dengan Ibu Inggrie (TehKu), ibu Eni H (KJRI Chicago),

				2. Membahas rencana kunjungan Delegasi Kota Lamongan yg akan dipimpin Bupati apabila agenda kunjungan juga ke Ohio	dan Dr. A. Rachman (Kementan)
22 Juni 2016	Pertemuan dengan The MOAK Group di organisir Atase Perhubungan di KBRI	Michael Wascom, Senior VP, Boyd Bailey, VP, Atase Perhubungan, Fungsi Ekonomi, Attani dan Korfung Pensosbud		1. Atase Perhubungan mengenalkan institusi ini yang terbuka untuk kerjasama dengan Garuda setelah menerima Cat 1 dari FAA. 2. Diperoleh informasi juga bahwa tidak akan ada kewajiban lain diluar yang tercover FAA setelah menerima Cat 1	Attani akan menggunakan informasi kembalinya Garuda terbang untuk tujuan AS ini untuk kepentingan promosi produk pertanian
25 – 28 Juni 2016	Summer Fancy Food Show (FFS) di New York	Dubes, Atdag dan Staf, Attani dan Staf, Fungsi Ekonomi, ITPC Chicago dan 10 Pelaku Industri Pangan Indonesia		1. Pavilion Indonesia diikuti 10 perusahaan pangan (makanan-minuman) yaitu Jans Food, Mahaghra, PT Singabera, CV Rembyung Sakha, PT Bukitsari, Ladang Lima, Kara-TehKu/Glopac, Lokal Kopi Trading Co dan Javanese Coffee 2. Jans Food dan Rembyung Sakha ikut untuk ke-2 kalinya dan volume pesanan bertambah, sedangkan yang lain untuk pertama kali, namun bertekad untuk ikut lagi sehingga indikator keberhasilan promosi produk dapat diukur 3. Dubes mengunjungi pavilion Indonesia memberikan perhatian dan mendengarkan penjelasan pada peserta booth, memberikan arahan kepada atdag, attani, korfung ekonomi untuk bekerja bersama lebih intensif untuk melakukan promosi tahun depan dan tahun berikutnya. Pavilion Indonesia menghasilkan perkiraan pemesanan lebih dari 750 ribu USD yang berasal dari seluruh peserta	1. KBRI melalui Attani dan Atdag akan menindaklanjuti kegiatan serupa untuk even berikutnya tahun 2017 yang lebih besar dan diharapkan melibatkan Kementerian di Jakarta 2. Perusahaan yang ikut FFS tahun depan akan ditambah 3. Attani akan mengirimi Brafak laporan kegiatan ini. Sesuai arahan Dubes tahun 2015, attani akan mengajak Atdag untuk mempelajari even East Natural Product Expo di Baltimore dan mencoba berpartisipasi untuk melihat kemungkinan Indonesia juga dapat berpartisipasi pada West Natural Product Expo di Anaheim California bulan Maret 2017
30 Juni 2016	2016 Agricultural Attache	Tim US-ABC, Attani dan		1. Pertemuan dibuka dan dimoderatori oleh Mr.	Attani akan mengirimkan informasi

		Roundtable di kantor US-ABC	staf, Atase Pert/fungsi ekon negara ASEAN dan pelaku usaha AS	<p>Marc Mealy, VP-Policy US ASEAN Business Council</p> <p>2. Perwakilan industri yang menyampaikan remarks Cargill, ADM, Elanco, dari pemerintah Kedutaan Negara ASEAN termasuk Indonesia.</p> <p>Attani menyampaikan perihal rencana Ministerial Meeting on Traceability of Fish and Fisheries Products di Jakarta tgl 27 Juli 2016 dan Trade Expo Indone-sia di Jakarta 12-16 Oktober 2016</p>	Trade Expo Indonesia ke US-ABC untuk dapat disebarakan ke anggota para pelaku usaha
	30 Juni 2016	Rapat Koordinasi Kegiatan KBRI	DCM, Korfung/Fungsi dan Atase Teknis	<p>1. Membahas kegiatan para fungsi dan atase teknis untuk bulan Juli 2016</p> <p>2. Attani menyampaikan rencana keg eval/sikronisasi atase pertanian di Jakarta walaupun belum menerima undangan resmi</p>	Attani akan menyiapkan nota dinas, memproses dokumen dan menyiapkan bahan untuk tugas ke Jakarta